

SARMINI
KETUT PRASETYO
AGUNG DWI BAHTIAR EL RIZAO
SRI SUKARTININGSIH



Buku Referensi

MODEL KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN ANAK JALANAN DI SURABAYA

Buku Referensi

MODEL KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN ANAK JALANAN DI SURABAYA

Sarmini
Ketut Prasetyo
Agung Dwi B
Sri Sukartiningih



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2020

**MODEL KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN UNTUK MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN ANAK JALANAN DI SURABAYA**

x + 96 hlm.; 18 x 25 cm

ISBN: 978-602-451-780-9

Penulis : Sarmini... [et al.]

Tata Letak : Nur Huda A.

Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan : Mei 2020

Copyright © 2020 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

RINGKASAN

Anak jalanan menjadi persoalan serius di Kota Surabaya. Bekerja menyebabkan anak jalanan kehilangan hak pendidikan, cenderung melakukan kriminalitas, melakukan pergaulan bebas dan rentan bahaya narkoba. Pemerintah telah melakukan program pemberdayaan anak jalanan, melalui UPTD Shelter Anak Bangsa yang dibentuk tahun 2009 untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan dengan tujuan utama untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial, akan tetapi belum berdampak signifikan terhadap kemandirian. Masih ada anak jalanan yang memilih kembali kepada kehidupan jalanan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) melakukan identifikasi dan analisis model kebijakan dalam pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan di Surabaya Jawa Timur; (2) mengembangkan model kebijakan program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian Anak Jalanan di Surabaya Jawa Timur. Pengembangan model ini didasarkan dari hasil analisis terhadap model yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu model pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan dua desain, yaitu desain penelitian analisis isi (*content analysis*) dan penelitian pengembangan. Lokasi penelitian adalah Shelter Anak Bangsa di Surabaya. Penelitian analisis isi digunakan untuk menganalisis isi dokumen terkait dengan pembentukan, program kerja Shelter Anak Bangsa, jaringan dengan pihak lain dalam melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan program kemandirian anak jalanan. Penelitian pengembangan digunakan untuk pengembangan model kebijakan program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian. Penelitian pengembangan ini menggunakan Model pengembangan perangkat *Four-D Model*. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu *Define* (pendefinisian), *Design* (perancangan), *Develop* (pengembangan), dan *Disseminate* (penyebaran).

Subyek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pengurus lembaga tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan Kuisioner untuk melihat pola pemberdayaan yang telah dilaksanakan di Shelter Anak Bangsa di Surabaya. Dokumentasi digunakan untuk mempelajari dasar hukum pemberdayaan anak jalanan dan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), yang telah dimiliki. Sedangkan teknik analisis data melalui empat tahap yaitu pengumpulan data (*data collection*), Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion verification*). Penarikan kesimpulan dilakukan

terus menerus sepanjang peneliti masih berada di lapangan sampai pada kesimpulan terakhir.

Hasil Penelitian ini menunjukkan dua hal. **Pertama**, Analisis Model Kebijakan Shelter Anak Bangsa di Surabaya dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan. Hasil analisis menunjukkan : (1) Model yang ada didominasi unsur SKPD (Pemerintah), sedangkan dari non pemerintah masih sebatas relawan dari ormas dan lembaga psikolog yang dilibatkan; (2) Belum ada mekanisme kontrol yang melibatkan orang tua dan masyarakat pasca anak jalanan kembali ke kehidupan normal; (3) memprioritaskan kemandirian dalam hal pekerjaan saja, belum difikirkan jalur beasiswa bagi anak yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi; (4) bergantung anggaran pada Pemerintah Kota, belum disiapkan alternative lain untuk membiayai program kerja/kegiatan yang sudah direncanakan. **Kedua**, Pengembangan Model Kebijakan Program Pemberdayaan Anak Jalanan Untuk Meningkatkan Kemandirian Di Surabaya Jawa Timur, difokuskan pada penguatan dan penambahan komponen model yang telah ada, yaitu difokuskan pada optimalisasi peran non pemerintah seperti, jaringan dunia usaha dan dunia kerja, optimalisasi peran keluarga, masyarakat, dan Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan beberapa pihak yaitu: (1) pedoman bagi Pemerintah untuk melakukan program pemberdayaan anak jalanan; (2) acuan bagi pendamping dalam melakukan pembinaan; (3) dasar bagi perusahaan dan mitra untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan anak jalanan; dan (4) keluarga dan masyarakat dapat turut serta dalam menyukseskan program pemberdayaan dan meningkatkan kemandirian anak jalanan.

Kata Kunci: *pengembangan model, model kebijakan, pemberdayaan anak jalanan, anak jalanan, kemandirian anak jalanan.*

PRAKATA

Pemberdayaan anak jalanan merupakan sebuah upaya dalam bentuk program kegiatan yang bertujuan untuk membantu memperoleh wawasan dan pengetahuan serta mengasah kemampuan dan keterampilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Partisipasi dan kerjasama berbagai pihak menjadi penting. Shelter Anak Bangsa adalah nama samaran dari lembaga penampungan anak jalanan di Surabaya, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi dan melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan.

Buku referensi ini merupakan hasil penelitian tentang pengembangan model kebijakan program pemberdayaan peningkatan kemandirian anak jalanan di Kota Surabaya. Buku ini menawarkan model pemberdayaan kemandirian, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan kebijakan di Shelter Anak Bangsa dan Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) terkait dalam melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan di Kota Surabaya. Model ini menguatkan pada unsur sinergitas dalam pemberdayaan anak jalanan antara Pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian anak jalanan.

Terselesaikannya Buku ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dihaturkan terima-kasih yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti melalui pendanaan penelitian tahun 2019; dan Universitas Negeri Surabaya yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian hingga terbitnya buku ini.

Harapan penulis buku ini mampu dijadikan *grand model* dalam program pemberdayaan anak jalanan di Kota Surabaya maupun di kota-kota besar lainnya untuk membangun kemandirian anak jalanan. Sekaligus menjadi pijakan penulis lain yang berminat dalam persoalan yang sama.

Surabaya, Mei 2020
Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN	iii
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan Buku	7
1.4. Manfaat Khusus.....	7
1.5. Urgensi (Keutamaan)	8
1.6. Kontribusi dalam Menunjang Pembangunan dan Pengembangan Ipteks-Sosbud	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. <i>State of The Art</i> tentang Model Kebijakan.....	11
2.2. <i>State of The Art</i> tentang Konsep Pemberdayaan.....	15
2.3. <i>State of The Art</i> tentang Kemandirian Anak Jalanan	22
2.4. <i>State of The Art</i> tentang Model Kebijakan Pemberdayaan anak Jalanan di Berbagai Kota Besar di Indonesia	29
2.5. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Anak Jalanan	40
2.6. Hasil Penelitian Sebelumnya dan Studi Pendahuluan yang telah dilakukan.....	50
2.7. Program Kerja Shelter Anak Bangsa	52
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1. Desain Penelitian	59
3.2. Variabel.....	64
3.3. Subyek Penelitian	64
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.5. Teknik Analisis Data.....	65

BAB IV	HASIL PENGEMBANGAN PRODUK	67
4.1.	Identifikasi dan Analisis Model Kebijakan Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Surabaya Jawa Timur.....	67
4.2.	Pengembangan Model Kebijakan Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Surabaya Jawa Timur	75
BAB V	PENUTUP	89
5.1.	Simpulan	89
5.2.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		91
BIOGRAFI PENULIS		95

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1. Pendekatan dan Penanganan Anak Jalanan	19
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 0.1	Komponen Analisis dengan Alur analisis Miles dan Huberman.....	65
Gambar. 0.2	Model Pemberdayaan Anak Jalanan Shelter Anak Bangsa	68
Gambar. 0.3.	Pengembangan Model Pemberdayaan Abak Jalanan di Surabaya.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi menuntut seluruh aspek dalam kehidupan bergerak serba cepat dan serba modern yang mengakibatkan persaingan dan perlombaan semakin ketat. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan sebagai bekal dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi membawa pengaruh yang signifikan pada keadaan perbedaan kondisi masa kini dan masa yang lampau. Globalisasi menyebabkan tekanan kehidupan pada kota di suatu wilayah menjadi lebih keras dari pada sebelumnya (Massey, Allen dan Pile, 1999).

Tekanan arus globalisasi yang terjadi merubah penampilan kota secara fisik maupun non fisik. Kota yang dulunya menjadi simbol kesejahteraan dan kesempatan berusaha bagi penduduk kota maupun wilayah-wilayah sekitarnya justru menjadi sumber masalah sosial. Munculnya kelompok-kelompok di Perkotaan menimbulkan peningkatan masalah sosial di perkotaan yang ditandai dengan beberapa hal, yaitu: (a) makin sulitnya para penduduk yang berpenghasilan dibawah standar mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar, (b) munculnya pemukiman kumuh di wilayah kota karena ketidak mampuan masyarakat miskin mempunyai rumah layak huni, (c) serta jumlah anak jalanan yang memprihatinkan membutuhkan penanganan lebih komprehensif.

Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota Negara berkembang telah memaksa sejumlah anak pergi ke jalan ikut mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri. Kehadiran anak jalanan yang semakin besar jumlahnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi ketertiban, kebersihan dan keamanan, serta keindahan kota. Apabila jumlah anak jalanan semakin besar maka semakin besar pula jumlahnya, maka tanggungan masyarakat dan pemerintah menjadi lebih berat.

Fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota-kota besar di Indonesia. Apabila dicermati dengan baik, hampir seluruh kota-kota besar masih terdapat anak jalanan yang mudah ditemui. Mulai dari persimpangan jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, bahkan mall, menjadi tempat-tempat anak jalanan melakukan

aktivitasnya. Tidak dapat dipungkir bahwa anak tersebut dianggap sebagai pengganggu keamanan dan ketertiban umum (Pardede, 2008).

Munculnya anak jalanan ditengarai berhubungan erat dengan status ekonomi keluarga. Semakin tinggi tingkat ekonomi keluarga maka kecenderungan menjadi anak jalanan semakin rendah, dan sebaliknya (Siregar, dkk, 2006). Kebanyakan anak memilih meninggalkan rumah dan menjadi anak jalanan karena berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Aptekar dan Stoecklin, 2014). Selain itu, kemiskinan, kurangnya penghargaan bagi anak-anak, luntturnya nilai-nilai dalam masyarakat, serta terdisintegrasinya keluarga juga merupakan penyebab munculnya fenomena anak jalanan (Lusk, 1995 dan Le Roux dan Smith, 1998).

Anak jalanan menjadi salah satu tanggung jawab negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa anak jalanan harus mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam upaya melaksanakan aturan tersebut, Indonesia telah menjadi salah-satu negara yang meratifikasi "*The World Convention On The Rights of The Child 1989 (Konvensi Hak Anak/KHA)*", dimana konvensi ini merupakan konvensi perjanjian internasional yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang membahas mengenai hak-hak anak, selanjutnya diperkuat lagi dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seiring dengan perkembangan Kota besar, jumlah anak jalanan makin meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa faktor menjadi penyebab anak-anak menjadi anak jalanan yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, keluarga dan individu. Anak jalanan kehilangan hak pendidikan, menghadapi masalah kesehatan, pelecehan diri, kriminalitas, dan penyalahgunaan narkoba. Dengan berbagai permasalahan tersebut berdampak munculnya trauma seperti pengabaian, penganiayaan, trauma psikologis, kekerasan fisik maupun pelecehan seksual

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan 15 Rumah Singgah yang ada di Surabaya hasilnya prosentase jumlah anak jalanan jauh lebih banyak yaitu 248.665 bila dibandingkan dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang hanya 51 orang. Umumnya, anak jalanan mangkal di sepanjang perempatan/*traffic light* yang ada di pusat-pusat kota. Dikota Surabaya, berbagai kebijakan pemerintah kota dalam menangani anak jalanan telah diajukan dengan berbagai cara penanganan, antara lain dengan memasukkannya kerumah singgah tempat-tempat pelatihan, serta dengan memberi bekal ketrampilan kepada mereka. Upayapenanganan anak jalanan juga dilakukan secara preventif dengan harapan agar jumlah anak jalanan dapat berkurang.

Keberadaan anak jalanan di kota Surabaya menjadi persoalan yang penting untuk diperhatikan. Berpijak pada Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan beberapa LSM dan rumah singgah untuk mengatasi anak jalanan. Pemkot Surabaya juga membentuk UPTD Shelter Anak Bangsa untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan. Namun, pemberdayaan yang dilakukan kurang berdampak pada kemandirian anak jalanan setelah selesai pembinaan di Shelter Anak Bangsa, masih ada alumni yang kembali ke kehidupan jalanan atau melakukan tindakan melawan hukum. Beberapa faktor menjadi penyebab yaitu: (1) adanya penolakan dari anak jalanan terhadap program pembinaan; (2) tidak semua pendamping memahami tujuan pemberdayaan untuk menyiapkan kemandirian anak jalanan; (3) kurangnya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang akan memperkerjakan anak jalanan; (4) kurangnya pelibatan keluarga dan masyarakat untuk mendukung program; (5) tidak ada tindak lanjut dari program pelatihan yang diberikan pada anak jalanan; dan (6) fokus perhatian pelayanan hanya ditujukan pada saat anak jalanan berada di Shelter Anak Bangsa, tidak bertujuan setelah lulus.

Penanganan anak jalanan (anjel) tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah, peran serta dari masyarakat juga sangat diperlukan karena anak jalanan juga merupakan bagian dari masyarakat namun dalam kehidupannya mereka dianggap menyimpang dari nilai dan norma yang ada di masyarakat. Kepedulian terhadap anak jalanan oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dimana didalamnya penanganan anak jalanan juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah.

Lebih lanjut, peran serta pihak swasta atau masyarakat dibutuhkan guna menekan pertumbuhan jumlah anak jalanan. Melalui diberlakukannya payung hukum untuk mendirikan rumah singgah UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 3107/HUK 2009 Tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial No.108/HUK/2009 Tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pihak swasta diberi kesempatan dan ruang yang sama untuk pengentasan masalah sosial anak jalanan (anjel) untuk penyediaan tempat singgah bagi mereka. Swasta dituntut untuk bekerjasama dengan pemerintah agar penanganan anak jalanan lebih efektif dan efisien. Ini terbukti banyaknya rumah

singkah yang ada bagi anak jalanan di Kota Surabaya khususnya, seperti rumah singkah Sanggar Alang-Alang yang ada di Wonokromo yang dibentuk sejak 16 April 1999, selanjutnya ada rumah singkah Yayasan Indonesia Sejahterah Barokah yang dalam penanganannya memberikan bimbingan belajargratis kepada anak jalanan dan anak-anak kurang mampu yang berada di sekitar daerah Kedungdoro, Surabaya. Dengan adanya rumah singkah yang telah dikelola oleh swasta, secara langsung telah membantu pengentasan permasalahan anak jalanan.

Dalam memberdayakan anak jalanan di Surabaya, Dinas Sosial membentuk tempat khusus untuk menampung anak yang bermasalah sosial yang dinamai UPTD Shelter Anak Bangsa. UPTD ini dibentuk oleh Dinas Sosial pada 4 Januari 2009 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor: 467/ /436.6.15/2009 dilanjutkan dengan turunnya Perwali No 61 tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Shelter Anak Bangsa pada Dinas Sosil Kota Surabaya. Di dalam UPTD Shelter Anak Bangsa dilakukan program pemberdayaan yang ditujukan bagi anak yang bermasalah sosial, salah satunya anak jalanan yaitu dengan memberikan daya kepada anak-anak jalanan agar mereka mampu meningkatkan kemandiriannya sehingga tidak turun lagi ke jalanan. Dibentuknya UPTD Shelter anak bangsa bertujuan untuk mewujudkan anak-anak yang bermasalah sosial berperilaku normative dan mandiri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara mandiri.

Dalam meningkatkan kemandirian anak-anak bermasalah sosial salah satunya anak jalanan tidak cukup dengan memberikan stimulus materi saja, namun yang paling penting adalah hak untuk memperoleh akses bagi perubahan kehidupannya. Kehidupan anak jalanan dapat dirubah apabila mereka memperoleh pendidikan dan ketrampilan yang dapat meningkatkan kemandirian mereka. Selama ini UPTD Shelter Anak Bangsa dalam meningkatkan kemandirian anak-anak binaannya dengan cara memberikan intervensi melalui bimbingan, bimbingan meliputi: bimbingan mental dan spiritual, bimbingan jasmani, bimbingan bakat minat, bimbingan kognitif, dan bimbingan sosial.

Dari hasil pengamatan dan informasi awal yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan di Shelter Anak Bangsa menunjukkan masih terdapat beberapa kekurangan, yakni: (a) pelanggaran yang dilakukan anak-anak karena kebiasaan hidup bebas, (b) Motivasi untuk maju dan menjadi lebih baik juga rendah, (c) Standar operasional yang tersedia belum menunjukkan upaya efektif dan efisien untuk membina kemandirian anak jalanan, (d) Evaluasi dan monitoring yang dilakukan setelah pembinaan juga masih rendah, (e) Tingkat kemandirian lulusan juga masih rendah, terbukti dari lulusan yang telah menunjukkan hasilnya hanya 4 orang. Oleh sebab itu, perlu disusun model

kebijakan program pemberdayaan yang lebih komprehensif dan menyeluruh guna memaksimalkan proses pembinaan dengan tujuan membentuk kemandirian.

Kemandirian yang kuat dimasa kecil akan menjadi dasar bagi kemandirian pada masa remaja, dewasa dan seterusnya. Kemandirian sejak dini sangat penting bagi anak untuk kelangsungan hidup dimasa yang akan datang. Fuad (2005: 206), menyebutkan ada tiga komponen kemandirian anak yang paling mendasar yang perlu ditanamkan sejak dini oleh para orang tua di antaranya: a) kemandirian intelektual; b) kemandirian emosi; c) kemandirian spiritual.

Fakta dilapangan menunjukkan pilihan menjadi anak jalanan menyebabkan mereka mengesampingkan hak pendidikan (Kader & Hasibeh, 2014). Akses pendidikan menjadi terbatas karena kemiskinan, dan kelalaian orang tua. Dengan demikian motivasi untuk melanjutkan pendidikan menjadi menurun karena bekerja menjadi pilihan dominan untuk pemenuhan kebutuhan. Kesempatan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan sebagai sarana mobilitas menjadi terbatas bahkan tertutup (Somayyeh & Nurettin, 2014). Kehidupan Anak jalanan sering bersinggungan dengan resiko-resiko besar yang selalu mengintai setiap saat, seperti kecelakaan, kesehatan yang buruk, pelecehan seksual, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba serta stigma negatif dari masyarakat (Md & Julia, 2018; Jude et al., 2018; Ipek, 2014). Besarnya resiko yang dihadapi menyebabkan munculnya trauma seperti pengabaian, penganiayaan, dan trauma psikologis (Jeanette, 2016). Oleh karena itu anak jalanan membutuhkan jaringan/kelompok sebagai katup penyelamat agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak dikemudian hari. Kerjasama, hubungan persahabatan dan pertukaran antar teman menjadi penting untuk perlindungan dan keamanan individu sebagai bagian dari kelompok anak jalanan Hazan, 2017). Meskipun pada sisi yang lain, cara ini justru melanggengkan ikatan kehidupan untuk tetap memilih jalanan sebagai tempat menyabung kehidupan (Andrej & Vesna, 2011).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak jalanan. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan telah mengupayakan penanganan anak jalanan dengan cara menyediakan pusat perlindungan dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan dan perlindungan bagi anak jalanan. Selain itu, program keterampilan seringkali menjadi program tambahan untuk membekali anak jalanan bekerja di sektor informal (Phil, 2018; H. Ozden, 2012; Debbi & Fucui, 2008).

Program penanganan anak jalanan model lembaga perlindungan bukan tidak memiliki permasalahan. Kendala utamanya yaitu anak-anak yang cenderung ingin kembali ke jalanan meskipun fasilitas, sarana-prasarana,

bahkan program yang ditawarkan telah memenuhi standar yang ditentukan (Debbi & Fucai, 2008). Dibutuhkan pendamping yang baik yang memiliki strategi efektif agar anak-anak ini dapat melupakan kehidupan jalanan (Wanjiku, Lars & Beth, 2016). Oleh karena itu diperlukan pembinaan untuk para pendamping dan pembekalan keterampilan pengasuhan anak yang baik agar program berjalan efektif (Bernardo, Raquel & Miguel, 2009). Pusat perlindungan dan pendidikan anak jalanan harus mampu menjadi jaringan sosial yang baru bagi mereka, yang akan memberikan informasi seputar pekerjaan. Jaringan baru ini akan membantu anak-anak menemukan pekerjaan baru yang lebih baik (Hazan, 2017). Bekal pendidikan dan ketrampilan yang mereka terima sepanjang rehabilitasi serta jenis pekerjaan yang lebih baik akan berdampak keberhasilan program reintegrasi yaitu memasukkan mereka kembali ke komunitas/masyarakat sebagai tujuan dari pusat perlindungan (Melissa et al., 2011).

Setiap bentuk penyelesaian masalah anak jalanan membutuhkan bantuan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat (Nawaf, Margarita & Janelle, 2017). Dibutuhkan sebuah mekanisme kontrol agar program berhasil (Frank, 2016). Selain Pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat juga memiliki andil dalam penyelesaian masalah anak jalanan. Lembaga swadaya masyarakat biasa menawarkan bantuan dengan menggunakan pendekatan sosio-psikologis untuk menangani masalah trauma dan segala bentuk permasalahan yang dialami anak jalanan (Jude et al., 2018). Sedangkan lembaga pendidikan lebih suka mengambil peran menggunakan pendekatan psikoanalisis berupa program-program bimbingan belajar dan seni (H. Ozden & Figen, 2014; Gaston & Immaculee, 2014). Sehingga, model pemberdayaan yang melibatkan jaringan dunia usaha dan industri serta optimalisasi peran orang tua dan masyarakat merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian masalah anak jalanan (Rizaq, Sarmini, Prasetyo, & Sukartiningsih, 2019) .

Pemerintah Surabaya melalui Shelter Anak Bangsa yang menginduk pada Dinas Sosial mencoba untuk menggagas lembaga perlindungan dan pembinaan bagi anak-anak jalanan. Tujuan dari shelter Anak Bangsa adalah memberikan layanan pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok dan menyiapkan masa depan mereka pasca lulus dari UPTD. Segala bentuk kegiatan diarahkan bagi terwujudnya kemandirian anak jalanan seperti pelatihan kedisiplinan, bimbingan mental, keterampilan olahraga, seni dan pendidikan kewirausahaan. Jika diperhatikan, program pemberdayaan yang dilakukan dinas sosial belum bertujuan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan. Model pembinaan yang ada belum melibatkan seluruh stakeholder. Oleh karena itu penelitian tentang pengembangan model kebijakan program pemberdayaan anak jalanan

untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya menjadi penting untuk dilakukan.

Berpijak dari uraian di atas, penelitian ini mengembangkan model pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan menjadi penting. Sehingga, model yang dihasilkan berfungsi sebagai pijakan bagi Shelter Anak Bangsa untuk membangun kemandirian anak jalanan. Selain itu, model yang dikembangkan juga dapat dijadikan pijakan untuk merumuskan kebijakan terkait dengan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis model kebijakan program pemberdayaan anak jalanan yang telah dilakukan Shelter Anak Bangsa di Surabaya?
- b. Bagaimana mengembangkan model kebijakan program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya?

1.3. Tujuan Penulisan Buku

Terdapat beberapa tujuan penulisan buku ini:

- a. Sebagai *grand model* pemberdayaan anak jalanan di kota Surabaya untuk membangun kemandirian anak jalanan
- b. Sebagai pijakan bagi Shelter Anak Bangsa dan Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan pemberdayaan anak jalanan di Kota Surabaya untuk tujuan peningkatan kemandirian anak jalanan
- c. Sebagai instrumen pedoman kebijakan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan sinergitas dalam pemberdayaan anak jalanan antara Pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian anak jalanan.

1.4. Manfaat Khusus

Ada beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini:

- a. Sebagai pedoman Shelter Anak Bangsa dalam melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya Jawa Timur
- b. Menjadi Instrumen Shelter Anak Bangsa dalam melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya Jawa Timur
- c. Sebagai dasar pijakan bagi perusahaan dan mitra untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan;

- d. Menjadi dasar bagi keluarga dan masyarakat dapat turut serta dalam menyukseskan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan.
- e. Sebagai pedoman Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya dalam berkontribusi melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya Jawa Timur
- f. Menjadi Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugasnya bersinergi dengan SKPD lainnya terkait program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya Jawa Timur
- g. Sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait kontribusi dalam program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya Jawa Timur

1.5. Urgensi (Keutamaan)

Pengembangan model kebijakan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan di Surabaya ini, menjadi penting: (1) berfungsi sebagai arah Pemerintah pada program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian; (2) pedoman bagi pendamping untuk melakukan pembinaan anak jalanan; (3) Memberikan Pedoman Shelter Anak Bangsa dalam melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya Jawa Timur; (4) acuan bagi perusahaan dan mitra lainnya untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan anak jalanan; (5) Memberikan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugasnya bersinergi dengan SKPD lainnya terkait program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian Di Surabaya Jawa Timur; (6) dasar bagi keluarga dan masyarakat untuk turut serta dalam menyukseskan program pemberdayaan dan meningkatkan kemandirian anak jalanan.

1.6. Kontribusi dalam Menunjang Pembangunan dan Pengembangan Ipteks-Sosbud

Hasil penelitian ini memberikan beberapa kontribusi yang dapat digunakan sebagai upaya membangun pemberdayaan anak jalanan dalam membangun kemandirian, yaitu:

- a. Membangun model kebijakan program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya Jawa Timur.
- b. Memberikan pedoman UPTD Shelter Anak Bangsa dalam melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan Untuk Meningkatkan Kemandirian di Surabaya Jawa Timur

- c. Memberikan Instrumen UPTD Shelter Anak Bangsa dalam melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya Jawa Timur
- d. Pijakan bagi perusahaan dan mitra untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan;
- e. Pijakan dasar bagi keluarga dan masyarakat dapat turut serta dalam menyukseskan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan.
- f. Memberikan pedoman Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya dalam berkontribusi melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya Jawa Timur
- g. Memberikan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugasnya bersinergi dengan SKPD lainnya terkait program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya Jawa Timur
- h. Memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait kontribusi dalam program pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian di Surabaya Jawa Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *State of The Art* tentang Model Kebijakan

Model pada hakikatnya merupakan bentuk abstraksi dari suatu kenyataan (*a model is an abstraction of reality*). Disamping itu Model juga merupakan representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep/teori, diagram, grafik atau persamaan matematis. Dengan model dapat dilakukan analisis yang menjelaskan secara sederhana pemikiran-pemikiran tentang politik dan kebijakan publik.

2.1.1. Karakteristik Model Kebijakan Publik

Secara garis besar bahwa model dalam kebijakan publik itu memiliki karakteristik, sifat dan ciri tersendiri. Karakteristik tersebut antara lain ialah: Model dalam kebijakan publik itu harus:

- (1) Sederhana & jelas (*clear*); (2) Ketepatan dalam indentifikasi aspek penting dalam problem kebijakan itu sendiri (*precise*); (3) Menolong untuk pengkomunikasian (*communicable*); (4) Usaha langsung untuk memahami kebijakan publik secara lebih baik (*manageable*); (5) Memberikan penjelasan & memprediksi konsekuensi (*consequences*)

2.1.2. Model Pembuatan Kebijakan

Ada beberapa pendapat para ahli tentang model dalam hal pembuatan kebijakan, antara lain: model kebijakan berkembang sesuai dengan kondisi real yang ada. Diantara beberapa model kebijakan antara lainnya adalah:

1) Model Elite

Kebijakan publik dalam model elite dapat dikemukakan sebagai preferensi dari nilai-nilai elite yang berkuasa. Teori model elite menyarankan bahwa rakyat dalam hubungannya dengan kebijakan publik hendaknya dibuat apatis atau miskin informasi. Dalam model elite lebih banyak mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai elite dibandingkan dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Sehingga perubahan kebijakan publik hanyalah dimungkinkan sebagai suatu hasil dari merumuskan kembali nilai-nilai elite tersebut

yang dilakukan oleh elite itu sendiri. Dalam model ini terdapat dua lapisan kelompok sosial:

- a) Lapisan atas, dengan dengan jumlah yang sangat kecil (elit) yang selalu mengatur.
- b) Lapisan tengah adalah pejabat dan administrator.
- c) Lapisan bawah (masa) dengan jumlah yang sangat besar sebagai yang diatur.

Isu kebijakan yang akan masuk agenda perumusan kebijakan merupakan kesepakatan dan juga hasil konflik yang terjadi diantara elit politik sendiri. Sementara masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara birokrat/administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah

2) Model Kelompok

Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan. Dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan demikian pembuatan kebijakan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara bargaining, negoisasi dan kompromi. Tuntutan-tuntutan yang saling bersaing diantara kelompok-kelompok yang berpengaruh dikelola. Sebagai hasil persaingan antara berbagai kelompok kepentingan pada hakikatnya adalah keseimbangan yang tercapai dalam pertarungan antar kelompok dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing pada suatu waktu. Agar supaya pertarungan ini tidak bersifat merusak, maka sistem politik berkewajiban untuk mengarahkan konflik kelompok. Caranya adalah:

- a) Menetapkan aturan permainan dalam memperjuangkan kepentingan kelompok
- b) Mengutamakan kompromi dan keseimbangan kepentingan
- c) Enacting kompromi tentang kebijakan publik
- d) Mengusakan perwujudan hasil kompromi Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi perubahan kebijakan publik. Tingkat pengaruh kelompok ditentukan oleh jumlah anggota, harta kekayaan, kekuatan organisasi, kepemimpinan, hubungan yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggota dsb.

Model kelompok dapat dipergunakan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan publik. Menelaah kelompok-kelompok apakan yang paling berkompetensi untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik dan siapakan yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap keputusan yang dibuat. Pada tingkat implemantasi, kompetensi antar kelompok juga merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas bebjikan dalam mencapai tujuan.

3) Model Institusional

Kebijakan adalah hasil dari lembaga, yaitu hubungan antara kebijakan (policy) dengan institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasikan, serta diimplementasi oleh lembaga pemerintah. Menurut Thomas dye: dalam kebijakan publik lembaga pemerintahan memiliki tiga hal, yaitu: (a) legitimasi; (2) universalitas, danl (3) paksaan.

Lembaga pemerintah yang melakukan tugas kebijakan-kebijakan adalah: lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Termasuk juga didalamnya adalah lembaga pemerintah daerah dan yang ada dibawahnya. Masyarakat harus patuh karena adanya legitimasi politik yang berhak untuk memaksakan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut kemudian diputuskan dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Undang-undanglah yang menetapkan kelembagaan negara dalam pembuatan kebijakan. Oleh karenanya pembagaian kekuasaan melakukan *checks* dan *balances*. Otonomi daerah juga memberikan nuansa kepada kebijakan publik.

4) Model Inkremental (*Policy as Variatons on the Past*)

Model ini merupakan kritik pada model rasional. Pada model ini para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya, karena beberapa alasan, yaitu:

- a) Tidak punya waktu, intelektualitas, maupun biaya untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perumusan tujuan kebijakan.
- b) Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya.
- c) Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan demi kepentingan tertentu
- d) Menghindari konflik jika harus melakukan proses negoisasi yang melelahkan bagi kebijakan baru

5) Model System Theory (*Policy as system output*)

Pendekatan sistem ini diperkenalkan oleh David Eston yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan perubahan hidup yang relatif stabil. Ini kemudian dianalogikan dengan kehidupan sistem politik. Pada dasarnya terdapat 3 komponen utama dalam pendekatan sistem, yaitu: input, proses dan output. Nilai utama model sistem terhadap analisis kebijakan, adalah:

- a) Apa karakteristik sistem politik yang dapat merubah permintaan menjadi kebijakan publik dan memuaskan dari waktu ke waktu.
- b) Bagaimana input lingkungan berdampak kepada karakteristik sistem politik.
- c) Bagaimana karakteristik sistem politik berdampak pada isi kebijakan publik.
- d) Bagaimana input lingkungan berdampak pada isi kebijakan publik.
- e) Bagaimana kebijakan publik berdampak melalui umpan balik pada lingkungan.

Proses tidak berakhir disini, karena setiap hasil keputusan merupakan keluaran sistem politik akan mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya perubahan lingkungan inilah yang akan mempengaruhi demands dan support dari masyarakat. Salah satu kelemahan dari model ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Seringkali terjadi bahwa kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah memberi kesan telah dilakukannya suatu tindakan, yang sebenarnya hanya untuk memelihara ketenangan/kestabilan. Persoalan yang muncul dari pendekatan ini adalah dalam proses penentuan tujuan itu sendiri

6) Model Rasional (*Kebijakan sebagai laba sosial maksimum*)

Kebijakan rasional diartikan sebagai kebijakan yang mampu mencapai keuntungan sosial tertinggi. Hasil dari kebijakan ini harus memberikan keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih, dan pemerintah mencegah kebijakan bila biaya melebihi manfaatnya. Banyak kendala rasionalitas, Karakteristik rasionalitas sangat banyak dan bervariasi Untuk memilih kebijakan rasional, pembuat kebijakan harus:

- a) Mengetahui semua keinginan masyarakat dan bobotnya
- b) Mengetahui semua alternatif yang tersedia
- c) Mengetahui semua konsekuensi alternatif

- d) Menghitung rasio pencapaian nilai sosial terhadap setiap alternatif
- e) Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Asumsi rasionalitas adalah preferensi masyarakat harus dapat diketahui dan dinilai/bobotnya. Harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara konprehensif. Informasi alternatif dan kemampuan menghitung secara akurat tentang rasio biaya dan manfaat. Aplikasi sistem pengambilan keputusan. Pada dasarnya nilai dan kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat tidak dapat terdeteksi secara menyeluruh, sehingga menyulitkan bagi pembuat kebijakan untuk menentukan arah kebijakana yang akan dibuat. Pada akhirnya pendekatan rasional ini cukup problematis dalam hal siapa yang menilai suatu kebijakan bersifat rasionalitas atau tidak.

7) Model Proses (Siklus Kebijakan Publik)

Aktivitas politik dilakukan melalui kelompok yang memiliki hubungan dengan kebijakan publik. Hasilnya adalah suatu kebijakan yang berisi: Identifikasi/pengenalan masalah, Perumusan agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi kebijakan Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan Model Pilihan Publik (Opini Publik). Seharusnya ada keterkaitan anatara opini publik dengan kebijakan publik. Sehingga tidak timbul perdebatan kapan opini publik seharusnya menjadi faktor penentu terpenting yang sangat berpengaruh kepada kebijakan public.

2.2. *State of The Art* tentang Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan anak jalanan merupakan rangkaian program kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan anak jalanan, membantu memperoleh pengetahuan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup (Rahmaveda 2017). Terdapat tiga prinsip dalam pelaksanaan pemberdayaan yaitu kesetaraan, partisipatif, dan keberlanjutan. Kesetaraan merupakan prinsip utama yang menunjukkan adanya kesejajaran posisi stakeholder. Hubungan kesetaraan stakeholder bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman dan keahlian masing-masing. Prinsip partisipatif terkait dengan peran stakeholder adalah aktif terlibat dalam proses pemecahan masalah, pembuatan keputusan dan evaluasi. Partisipasi stakeholder akan menjadi kerjasama masyarakat (*client partnership*). Sedangkan prinsip keberlanjutan terkait dengan upaya yang dilakukan agar program yang Pemberdayaan Anak Jalanan Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.

Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Konsep pemberdayaan adalah salah satu konsep utama dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial pada era 1990-an hingga sekarang dan seringkali pemberdayaan dikaitkan dengan intervensi komunitas atau kelompok.

Menurut Soetrisno dikutip oleh Usman (2000:185) dalam tulisannya mengemukakan bahwa paradigma pemberdayaan ingin mengubah kondisi dengan cara memberi kesempatan kepada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang juga merupakan pilihan mereka sendiri. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Sedangkan menurut Payne (1997:266) dikutip oleh Adi (2001:32) bahwa suatu proses pemberdayaan, pada intinya ditujukan untuk: “Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.” Berdasarkan pengertian di atas, pemberdayaan memiliki tujuan untuk mengubah melalui penguasaan terhadap sesuatu yang nanti disumbangkan pada program-program yang berkaitan. Pada tulisan ini, anak jalanan yang menjadi sasaran dari pemberdayaan tersebut.

Konsep pemberdayaan secara langsung memiliki tujuan yaitu keberpihakan dan kepedulian dalam mengurangi anak-anak turun ke jalan dan membuat mereka untuk berdaya agar memiliki semangat bekerja untuk membangun diri mereka sendiri. Prinsip Pemberdayaan Brenda dan Miley (1992 : 212) dalam Maria (2001:58) mengemukakan tentang prinsip-prinsip dan asumsi-asumsi pemberdayaan dalam pekerjaan sosial sebagai berikut: (1) Pemberdayaan merupakan sebuah kolaborasi proses antara masyarakat yang diberdayakan dengan lembaga pemberdaya; (2) Proses pemberdayaan memandang sistem klien merupakan sesuatu yang penting dan mampu, memberikan kesempatan bahkan untuk mengakses berbagai sumber; (3) Klien harus mempersepsikan dirinya sebagai agen penyebab yang bisa membawa perubahan; (4) Kecakapan atau kesopanan diperoleh melalui pengalaman dalam kehidupan, khususnya mengenai pengalaman keberhasilan dari pada keadaan dimana seseorang menyatidakan apa yang dikerjakan; (5) Solusi itu muncul dan situasi perlu menekankan pada berbagai faktor yang cukup beragam di dalam situasi masalah tersebut; (6) Berbagai jaringan kerja sosial secara informal

merupakan suatu dukungan sumber yang penting untuk memfasilitasi tekanan stress dan meningkatkan kemampuan seseorang serta meningkatkan control; (7) Seseorang harus berpartisipasi di dalam memberdayakan dirinya sendiri, tujuan alat dan hasil yang diperoleh harus didefinisikannya sendiri; (8) Tingkat kesadaran adalah kunci pokok persoalan dalam pemberdayaan, memobilisasi pengetahuan untuk mengadakan perubahan; (9) Pemberdayaan melibatkan penjangkauan berbagai sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif; (10) Pemberdayaan adalah suatu proses yang dinamis, berkeinambungan, selalu berubah dan berjalan secara evolusi, pemecahan masalah selalu mempunyai tingkatan pemecahan tertentu; (11) Pemberdayaan diperoleh melalui struktur personal dan pengembangan sosial ekonomi yang paralel Sebuah pemberdayaan merupakan hasil kolaborasi antara pekerja sosial dengan klien.

Tekait dengan strategi Pemberdayaan Longres (1981) mengadakan pengamatan tentang strategi intervensi dan program yang bertujuan untuk menangani masalah sosial. dalam penanganan masalah sosial ini, Longres menghubungkan antara asumsi dan ideologi yang membentuk masalah tersebut, serta menjadi norma dasar dilakukannya intervensi. Yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Lusk pada tahun 1984. Strategi yang dibuat Longres (1981) berawal dari adaptasi sistem sosial hingga kebutuhan individu, dari adaptasi individu hingga prasyarat sistem sosial. dengan demikian pengembangan program strategi intervensi bagi anak jalanan tersebut meliputi (Lusk, 1984:65): a. Pendekatan Koreksional Anak jalanan dalam pandangan ini didominasi oleh pemikiran bahwa anak jalanan banyak yang berurusan dengan dunia kriminal. Oleh karena itu, intervensi yang cocok adalah memindahkan anak dari jalanan dan memperbaiki perilaku mereka. Pendekatan ini fokus pada mendidik kembali agar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; b. Pendekatan Rehabilitasi Anak jalanan dilihat sebagai anak yang dirugikan oleh lingkungannya, sehingga mengakibatkan banyak program-program sukarela muncul. Pendekatan rehabilitatif memandang anak jalanan sebagai anak yang berada dalam kondisi ketidakmampuan, membutuhkan, ditelantarkan, dirugikan, sehingga intervensi yang dilakukan adalah dengan melindungi dan merehabilitasi. c. Pendekatan yang dilakukan di Jalanan Pendekatan ini mengasumsikan bahwa hal terbaik untuk menanggulangi masalah anak jalanan adalah dengan mendidik dan memberdayakan anak jalanan.

Keempat program strategi intervensi di atas kemudian lebih dikerucutkan lagi oleh Lusk menjadi tiga program strategi intervensi. Yang mana program strategi intervensi ini cukup dikembangkan di banyak rumah singgah sebagai

model pendekatan dalam menangani anak jalanan. menurut Lusk yang dikutip oleh Sudrajat (1997:4), antara lain sebagai berikut.

1. *Street Based*

Merupakan penanganan di jalan atau tempat-tempat anak jalanan berada, kemudian para street educator datang kepada mereka, berdialog, mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Dalam beberapa jam, anak-anak diberikan materi pendidikan dan keterampilan, di samping itu anak jalanan memperoleh kehangatan hubungan dan perhatian yang bisa menumbuhkan kepercayaan satu sama lain yang berguna bagi pencapaian tujuan intervensi.

2. *Centre Based*

Pendekatan ini merupakan penanganan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini di tampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti seperti pada malam hari diberikan makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan bersahabat dari pekerja sosial. pada panti yang permanen disediakan pelayanan pendidikan, keterampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, kesenian, dan pekerjaan. Dalam penanganan di lembaga atau di panti terdapat beberapa jenis atau model penampungan yang bersifat sementara (*drop in centre*) dan tetap (*residential centre*) untuk anak jalanan yang masih bolak balik ke jalan biasanya dimasukan ke dalam *drop in centre*, sedangkan untuk anak-anak yang sudah benar-benar meninggalkan jalanan akan di tempatkan di *residential centre*.

3. *Community Based*

Di dalam *community based* penanganan melibatkan seluruh potensi masyarakat, utamanya keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak-anak turun ke jalan. Keluarga diberikan kegiatan penyuluhan pengasuhan anak dan peningkatan taraf hidup, sementara anak-anak diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian waktu luang dan kegiatan lainnya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Tabel 0.1.
Pendekatan dan Penanganan Anak Jalanan

Pengelompokan Anak Jalanan	Pendidikan Program/Strategi	Fungsi Intervensi
Anak yang masih berhubungan/tinggal dengan orang tua	Community based	Preventif
Anak yang masih ada hubungan dengan keluarga tetapi jarang berhubungan/ tinggal dengan orang tua	Street Based	Perlindungan
Anak tersisih/putus hubungan dengan keluarga/orang tua	Centre Based	Rehabilitasi

Pada kasus anak jalanan, model pendekatan dan penanganan yang dilakukan untuk anak jalanan binaan ialah centre based dengan fungsi intervensi rehabilitatif, yaitu berusaha melepaskan anak dari jalanan. Walaupun berfokus pada centre based, secara tidak langsung rumah singgah juga menggunakan pendekatan community based dan street based yang dapat dilihat dari program dan kegiatannya. Model penanganan dan pemberdayaan anak jalanan sangat penting diperhatikan karena model penanganan anak jalanan disesuaikan menurut kondisi anak jalanan yang beragam. Model-model yang diterapkan untuk anak jalanan tidak lepas juga dari pengaruh visi dan misi lembaga. Tata Sudrajat dalam Mulandar (1996:156) menjelaskan secara umum terdapat dua tujuan dalam penanganan anak jalanan, yakni: (1) Melepaskan anak jalanan untuk dikembalikan kepada keluarga asli, keluarga pengganti, ataupun panti. (2) Penguatan anak di jalan dengan memberikan alternatif pekerjaan dan keterampilan. Kedua tujuan tersebut tampak saling melengkapi, yakni memperkuat anak di jalan kemudian mencari peluang untuk mengembalikan anak kepada keluarganya.

2.2.1. Sinergitas antar Stakeholder

Sinergi menggambarkan kondisi ketika bagian-bagian dalam organisasi saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan bersama. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam sinergi antar stakeholder adalah komunikasi dan koordinasi. Komunikasi terkait dengan pemberian motivasi, penyampaian informasi dan emosi secara vertikal maupun horizontal.

Selain komunikasi, hal penting lain dalam sinergitas adalah koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa koordinasi sebagai kekuatan yang menyatukan orang-orang dalam tindakan yang

terorganisir. Koordinasi dibutuhkan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dan sumber-sumber dapat digunakan secara efektif dan efisien. Setelah komunikasi dan koordinasi, selanjutnya adalah perencanaan program. Program kegiatan suatu lembaga disusun melalui komunikasi dan koordinasi yang melibatkan seluruh *stakeholder*. Wawasan yang dimiliki oleh masing-masing akan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan.

1) Strategi S-T

- a) Peningkatan peran pemerintah atau rumah singgah untuk mengubah watak dan karakter anak jalanan. Adapun program kegiatan yang dilakukan oleh lembaga didalam strategi pemberdayaan anak jalanan.
 - (1) Pemberian beasiswa untuk anak jalanan dan anak terlantar
 - (2) Pelatihan keterampilan untuk anak jalanan
 - (3) Pemberian makanan untuk anak jalanan
- b) Peningkatan kesadaran, partisipasi dan pandangan masyarakat oleh Dinas sosial.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan program disos menjadi kurang efektif dan maksimal, maka sangatlah penting jika masyarakat sekitar anak jalanan yang akan diberdayakan juga diberi pengarahan agar membantu mensukseskan program pemerintah.

2) Strategi W-O

- a) Pemberdayaan orang tua anak jalanan untuk mendapatkan pekerjaan guna peningkatan ekonomi keluarga (keluarga anak jalanan).

Pemberdayaan orang tua anak jalanan dapat berupa pemberian ketrampilan dan bantuan modal usaha bagi orang tua anak jalanan serta penyuluhan dan mengubah sudut pandang orang tua anak jalanan tentang tanggung jawab sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak dan tidak memperkerjakan anak ke jalanan untuk mendapatkan uang untuk membantu ekonomi keluarga.
- b) Peningkatan anggaran dalam penyelesaian masalah oleh Pemerintah sehingga penanganan anak jalanan tidak terhambat
- c) Pengusulan Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanganan anak jalanan oleh dinas sosial.

Belum adanya peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum yang mengatur tentang anak jalanan akan membuat pelaksanaan program penanganan anak jalanan seringkali tidak dapat berjalan dengan baik.

3) Strategi W-T

- a) Pemberdayaan orangtua anak jalanan untuk mendapatkan pekerjaan guna penongkatan ekonomi keluarga (keluarga anak jalanan).

Pemberdayaan orang tua anak jalanan dapat berupa pemberian ketrampilan dan bantuan modal usaha bagi orang tua anak jalanan serta penyuluhan dan mengubah sudut pandang orang tua anak jalanan tentang tanggung jawab sebagai oarang tua untuk memenuhi kebutuhan anak dan tidak memperkerjakan anak ke jalanan untuk mendapatkan uang untuk membantu ekonomi keluarga.

- b) Peningkatan anggaran dalam penyelesaian masalah ole Pemerintah sehingga penanganan anak jalanan tidak terhambat
- c) Pengusulan Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanganan anak jalanan oleh dinas sosial

Belum adanya peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum yang mengatur tentang anak jalanan akan membuat pelaksanaan program penanganan anak jalanan seringkali tidak dapat berjalan dengan baik.

4) Strategi Pengelolaan Skills

Strategi pengelolaan skills adalah strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan anak jalanan dengan cara mengajarkan beberapa skill/ketrampilan, yaitu :

- a) *Health skills*: pengetahuan mengenai kesehatan meliputi hidup sehat, kebersihan, dan reproduksi.
- b) *Budgetting skills*: mengajarkan bagaimana mereka mengatur uang, mambuat daftar keuangan, membuat prioritas dan bagaimana menggunakan uang dengan pendapatan yang rendah. Partisipan diminta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memberi uang saku tiap minggu dan menabung.
- c) *Leadership skills*: kelas ini melatih anak jalanan untuk berpartisipasi dengan berpidato, menghubungi orang lain untuk berbicara atau memperkenalkan pembicara tamu. Hal ini akan memberikan kepercayaan diri kepada partisipan.

- d) *Counseling*: membantu anak jalanan cara bagaimana melepaskan amarah, meningkatkan *self-esteem*, dan memperkenalkan teknik pemecahan masalah. Konseling diberikan oleh seorang psikolog, baik secara individual maupun secara klasikal
- e) *Job training*: membantu partisipan membuat pilihan karir dan mengembangkan perencanaan untuk bekerja, memperkenalkan aspek sosial yang berhubungan dengan pekerjaan.
- f) *Life skills training*: fokus pada kesadaran akan konsekuensi Negative penggunaan narkoba, norma-norma yang dihargai oleh sebaya, membangun *self-esteem*, *coping* dengan kecemasan sosial dan skill komunikasi sosial.

2.3. State of The Art tentang Kemandirian Anak Jalanan

Penanganan anak jalanan berbasis pemberdayaan dirasa perlu agar suatu ketika mereka sudah melalui program pemberdayaan, mereka dapat mengembangkan pengetahuannya secara mandiri. Karena anak tidak hanya perlu diberi uang dan makan semata tetapi mereka juga perlu dididik dan diberi kasih sayang. Membangun kemandirian bagi anak jalanan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan prinsip entrepreneurship. Langkah awal dari prinsip ini adalah dengan mengadakan pelatihan pengembangan kewirausahaan bagi anak jalanan, dalam hal ini pekerja sosial perlu bertindak untuk mencari anak jalanan yang akan dijadikan sasaran. Pelatihan ini didesain dengan konsep yang menyenangkan dan tidak terlalu formal agar anak tidak cepat bosan dan menjadi beban, karena pada dasarnya anak-anak menyukai hal-hal yang berbau menyenangkan.

1. Pengertian Kemandirian

Kata kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an” yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, pembahasan mengenai kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah *self* oleh Brammer dan Shostrom (1982) karena diri itu merupakan inti dari kemandirian (dalam Ali, 2006 : 109). Kemandirian juga berasal dari kata “*independence*” yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung kepada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri (Chaplin, 1996 : 105).

Kemandirian berkenaan dengan pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu berdiri sendiri yaitu memiliki kepercayaan diri yang bisa membuat seseorang mampu sebagai individu untuk beradaptasi dan

mengurus segala hal dengan dirinya sendiri (Parker, 2006 : 226-227) Menurut Erikson kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk melepaskan dirinya dengan proses mencari identitas ego yaitu perkembangan kearah individualitas yang mantap untuk berdiri sendiri (dalam Monks, 2006 : 279).

Menurut Gea (2002 : 146) mandiri adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan kekuatan sendiri. Parker juga berpendapat bahwa kemandirian juga berarti adanya kepercayaan terhadap ide-ide diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan menyelesaikan sesuatu hal sampai tuntas. Kemandirian berkenaan dengan hal yang dimilikinya tingkat kompetensi fisik tertentu sehingga hilangnya kekuatan atau koordinasi tidak akan pernah terjadi ditengah upaya seseorang mencapai sasaran. Kemandirian berarti tidak adanya keragu-raguan dalam menetapkan tujuan dan tidak dibatasi oleh kekuatan akan kegagalan (Parker, 2006 : 226).

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah suatu keadaan seseorang dimana seseorang berusaha berdiri sendiri dalam arti tidak bergantung pada orang lain dalam keputusan dan mampu melaksanakan tugas hidup dengan penuh tanggung jawab.

2. Perkembangan Kemandirian

Perkembangan kemandirian adalah proses yang menyangkut unsurunsur normatif. Ini mengandung makna bahwa kemandirian merupakan suatu proses yang terarah. Karena perkembangan kemandirian sejalan dengan hakikat eksistensi manusia, arah perkembangan tersebut harus sejalan dan berlandaskan pada tujuan hidup manusia (Ali, 2006 : 112).

Menurut Havighurst (dalam Mu'tadin, 2002) perkembangan menuju kemandirian dan kebebasan pribadi secara normal berkembang hingga pada saat apabila seseorang telah mencapai kebebasan secara emosional, financial dan intelektual. Kemandirian, seperti halnya kondisi psikologis yang lain, dapat berkembang dengan baik jika diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan sejak dini. Latihan tersebut dapat berupa pemberian tugas-tugas tanpa bantuan dan tentu saja tugas-tugas tersebut disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak.

Menurut Parker tahap-tahap kemandirian bisa digambarkan sebagai berikut (dalam Qomariyah, 2011) : (a). Tahap Pertama, Mengatur kehidupan dan diri mereka sendiri. Misalnya: makan, kamar mandi, mencuci, membersihkan gigi, memakai pakaian dan lain sebagainya.

(b). Tahap Kedua, Melaksanakan gagasan-gagasan mereka sendiri dan menentukan arah permainan merek (e). Tahap Kelima, Mengurus orang lain baik didalam maupun diluar rumah, misalnya menjaga saudara ketika orang tua sedang diluar rumah.

3. Ciri-ciri Kemandirian

Tentang ciri kemandirian Gea (2002: 145) menyebutkan beberapa hal yaitu percaya diri, mampu bekerja sendiri, menguasai keahlian dan keterampilan, menghargai waktu dan bertanggung jawab. Kemandirian mempunyai ciri-ciri tertentu yang telah digambarkan oleh Parker dan Mahmud berikut ini: (a) Tanggung jawab berarti memiliki tugas untuk menyelesaikan sesuatu dan diminta hasil pertanggung jawaban atas hasil kerjanya; (b) Independensi adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung kepada otoritas dan tidak membutuhkan arahan. Independensi juga mencakup ide adanya kemampuan mengurus diri sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri; (c) Otonomi dan kebebasan untuk menentukan keputusan sendiri, berarti mampu untuk mengendalikan atau mempengaruhi apa yang akan terjadi kepada dirinya sendiri; (d) Keterampilan memecahkan masalah, dengan dukungan dan arahan yang menandai, individu akan terdorong untuk mencapai jalan keluar 19 bagi persoalan-persoalan praktis relasional mereka sendiri (Parker, 2006 : 234-237).

Menurut Mahmud ciri-ciri kemandirian adalah sebagai berikut:

- (a) Kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan sendiri;
- (b) Kemampuan-kemampuan menjalankan peranan baru yaitu perubahan-perubahan dalam peranan dan aktivitas sosial;
- (c) Kemampuan memikul tanggung jawab; (d) Memiliki rasa percaya pada diri sendiri; (e) Memiliki kejelasan pribadi yaitu berupa kemampuan benar dan salah.

Menurut Hurlock (1990) faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian adalah Pola asuh orang tua Orang tua dengan pola asuh demokratis sangat merangsang kemandirian anak, dimana orangtua memiliki peran sebagai pembimbing yang memperhatikan terhadap setiap aktivitas dan kebutuhan anak, terutama yang berhubungan dengan studi dan pergaulannya baik dilingkungan keluarga maupun sekolah. Diana Baumrind (dalam Desmita, 2008 :144-145) merekomendasikan 3 tipe pengasuhan yang dikaitkan dengan aspek-aspek yang berbeda dalam tingkah laku sosial anak, yaitu:

a. Pengasuhan otoritatif (*authoritative parenting*)

Merupakan salah satu gaya pengasuhan yang memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku anak-anak, tetapi

mereka juga bersikap responsive, menghargai dan menghormati pemikiran, perasaan, serta mengikutsertakan anak dalam pengambilan keputusan. Anak-anak prasekolah dari orang tua yang otoritatif cenderung lebih percaya pada diri sendiri, pengawasan diri sendiri, dan mampu bergaul baik dengan teman-teman sebayanya. Pengasuhan otoritatif juga diasosiasikan dengan rasa harga diri yang tinggi (*high self-esteem*), memiliki moral standar, kematangan psikososial, kemandirian, sukses dalam belajar, dan bertanggung jawab secara sosial.

b. Pengasuhan otoriter (*authoritative parenting*)

Merupakan suatu gaya pengasuhan yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Orang tua yang otoriter menetapkan batasan yang tegas dan tidak memberi peluang yang besar bagi anak-anak untuk mengemukakan pendapat. Orang tua otoriter juga cenderung bersikap sewenang-wenang dan tidak demokratis dalam membuat keputusan, memaksakan peran-peran atau pandangan-pandangan kepada anak atas dasar kemampuan dan kekuasaan sendiri, serta kurang menghargai pemikiran dan perasaan mereka. Anak dari orang tua yang otoriter cenderung bersifat curiga pada orang lain dan merasa tidak bahagia dengan dirinya sendiri, merasa canggung berhubungan dengan teman sebaya, canggung menyesuaikan diri pada awal masuk sekolah dan memiliki prestasi belajar yang rendah dibandingkan dengan anak-anak lain.

c. Pengasuhan permisif (*permissive parenting*)

Merupakan suatu gaya pengasuhan permisif dibedakan dalam dua bentuk: - Permissive-indulgent yaitu suatu gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak, tetapi menetapkan sedikit batas atau kendali atas mereka. Pengasuhan permissive-indulgent diasosiasikan dengan kurangnya kemampuan pengendalian diri anak, karena orang tua yang permissive-indulgent cenderung membiarkan anak-anak melakukan apa saja yang mereka inginkan, dan akibatnya anak-anak tidak pernah belajar mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu mengharapkan agar semua kemauannya dituruti. Permissive-indifferent yaitu suatu gaya pengasuhan di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang permissive-indifferent cenderung kurang percaya diri, pengendalian diri yang buruk, dan rasa harga diri yang rendah. Jenis Kelamin Anak yang berkembang dengan tingkah laku maskulin lebih mandiri lebih mandiri dibandingkan dengan anak yang mengembangkan pola tingkah laku yang feminin. Karena hal

tersebut laki-laki memiliki sifat yang agresif dari pada anak perempuan yang sifatnya lembah lembut dan pasif. c. Urutan posisi anak Anak pertama sangat diharapkan untuk menjadi contoh dan menjaga adiknya lebih berpeluang untuk mandiri dibandingkan dengan anak bungsu yang mendapatkan perhatian berlebihan dari orangtua dan saudara-saudaranya berpeluang kecil untuk mandiri.

Selanjutnya menurut Dimiyati (1989) mengatidakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian anak, antara lain: (a) Jenis kelamin Yang membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan dimana anak dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan masyarakat antara lain : sifat logis, bebas dan agresif pada anak lakilaki dan sikap lemah lembut, ramah, feminin pada anak perempuan; (b) Usia Semenjak kecil, anak berusaha mandiri manakala ia mulai mengeksploitasi lingkungannya atas kemampuannya sendiri, dan manakala ia ingin melakukan sesuatu akan kemampuannya sendiri, sehingga semakin bertambah tingkat kemandirian seseorang; (c) Urutan anak dalam keluarga Anak sulung biasanya lebih berorientasi pada orang dewasa, pandai menendalikan diri, cepat, tidakut gagal dan pasif. Jika dibandingkan saudara-saudaranya anak tengah lebih ekstrovert dan kurang mempunyai dorongan, akan tetapi mereka memiliki pendirian, sedangkan anak bungsu adalah anak yang disayang orang tuanya.

Menurut Dr. Benjamin Spock (dalam Nayla, 2007 :17) menyebutkan bahwa ada beberapa yang dapat mempengaruhi kemandirian anak, diantaranya yaitu: (a) Rasa percaya diri anak Rasa percaya diri dibentuk ketika anak diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu hal yang ia mampu kerjakan sendiri. Rasa percaya diri dapat dibentuk sejak anak masih bayi; (b) Kebiasaan Salah satu peranan orang tua dalam kehidupan sehari-hari adalah membentuk kebiasaan. Jikalau anak sudah terbiasa dimanja dan selalu dilayani, ia akan menjadi anak yang tergantung kepada orang lain; (c) Disiplin Kemandirian berkaitan erat sekali dengan disiplin. Sebelum anak dapat mendisiplinkan dirinya sendiri, ia terlebih dahulu harus di disiplinkan oleh orang tua.

Menurut Ali (2006 :118) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya kemandirian sebagai berikut: (a) Gen atau keturunan orang tua Orang yang memiliki sifat kemandirian yang tinggi, sering kali menurunkan anak yang kemandirian juga. Namun faktor keturunan ini masih menjadi perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya bukan sifat kemandirian yang

diturunkan pada anaknya melainkan sifat orang tuanya yang muncul berdasarkan cara orang tua mendidik anaknya; (b) Pola asuh orang tua Cara mengasuh orang tua yang mengasuh dan mendidik anak akan terlalu banyak melarang anak tanpa alasan yang jelas akan menghambat kemandirian anak; (c) Sistem pendidikan Proses pendidikan yang mengembangkan demokratis pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian.

Proses pendidikan yang menekankan pentingnya sanksi juga dapat menghambat perkembangan kemandirian. Sebaliknya proses pendidikan yang lebih menekankan pentingnya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian reward dan kompetisi positif akan melancarkan perkembangan kemandirian anak. Faktor-faktor yang menjadi kendala perkembangan kemandirian (Markum, 1985 : 83-88) antara lain: (a) Kebiasaan selalu dibantu atau dilayani, misalnya orang tua yang selalu melayani keperluan anak-anak seperti mengerjakan Pekerjaan Rumah nya akan membuat anak-anak manja dan tidak mau berusaha sendiri sehingga akan membuat anak tidak mandiri; (b) Sikap orang tua yang selalu bersikap memanjakan dan memuji anak akan menghambat kemandiriannya; (c) Kurangnya kegiatan diluar rumah, disaat-saat anak tidak mempunyai kegiatan dengan teman-temannya akan membuat anak bosan sehingga dia akan menjadi malas tidak kreatif serta tidak mandiri; (d) Peranan anggota lain, misalnya ada saudara yang melakukan tugas rumahnya maka akan menghambat kemandiriannya.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemandirian anak usia prasekolah terbagi menjadi dua, meliputi faktor internal dan faktor eksternal (Soetjiningsih, 1995). Faktor internal merupakan faktor yang ada dari diri anak itu sendiri yang meliputi emosi dan intelektual. Faktor emosi ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak terganggunya kebutuhan emosi orang tua. Sedangkan faktor intelektual diperlihatkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Sementara itu faktor eksternal yaitu faktor yang datang atau ada di luar anak itu sendiri. Faktor ini meliputi lingkungan, karakteristik, sosial, stimulasi, pola asuh, cinta dan kasih sayang, kualitas informasi anak dan orang tua, dan pendidikan orang tua dan status pekerjaan ibu (Soetjiningsih, 1995). Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian anak antara

lain: jenis kelamin, tingkat usia, pola asuh orang tua, urutan posisi anak, rasa percaya diri, kebiasaan, disiplin dan system pendidikan.

Untuk itu, perlu memahami yang dapat mempengaruhi kemandirian anak serta bagaimana upaya yang dapat ditempuh untuk mengembangkan kemandirian anak tersebut. Dari teori kemandirian anak, dapat dirumuskan menjadi kemandirian anak jalanan. Kemandirian dapat berkembang dengan lebih mantap, seperti:

(1) Kemandirian anak jalanan biasanya mereka dapat mengurus dirinya sendiri; (2) Kemandirian anak jalanan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang di lakukannya; (3) Kemandirian anak jalanan dapat berkembang dengan lebih mantap ketika mereka sudah mulai bisa berpindah pekerjaan yang lebih layak dari pada sebelumnya; (4) Kemandirian anak jalanan bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan sehingga individu pada akhirnya akan mampu berpikir dan bertindak sendiri. Kemandirian anak jalanan berupa mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, mempunyai sopan santun terhadap masyarakat sekitar, tidak melakukan kerusakan, dan bisa diperingati.

Kemandirian berkaitan dengan aktivitas memilih kiat dalam melakukan peremajaan terhadap identitas diri dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi. Dimensi kemandirian anak jalanan:

1) Kemandirian sosial

Kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain serta memiliki keinginan dan kemauan untuk mencapai tanggung jawab sosial. Pada umumnya anak jalanan memiliki tingkat kemandirian sosial yang tinggi. Terlihat melalui tingginya rasa percaya diri anak jalanan dalam bersosialisasi dengan lingkungannya.

2) Kemandirian intelektual

Kemandirian intelektual merupakan individu yang memiliki kemandirian intelektual dalam dirinya cenderung bertindak atas kehendaknya sendiri bukan karena orang lain dan tidak tergantung orang lain, atau dengan kata lain mampu berpikir dan bertindak secara original, kreatif dan penuh inisiatif. Anak jalanan memiliki tingkat kemandirian intelektual yang rendah. Terlihat melalui belum dimilikinya prinsip dan perencanaan hidup ke depan yang cukup kuat, sehingga seringkali anak jalanan mudah terbawa oleh lingkungan di sekitarnya. Selain itu, anak jalanan belum mampu mengembangkan pola pikirnya untuk menganalisis masalah dan

menyelesaikannya dengan baik. Sehingga seringkali anak jalanan tetap berada pada lingkup permasalahan yang sama.

3) Kemandirian belajar

Kemandirian belajar adalah suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangan, individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri dengan kemandiannya seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat berkembang dengan lebih baik. Anak jalanan memiliki tingkat kemandirian belajar yang rendah. Terlihat melalui rendahnya minat anak jalanan untuk mengikuti jalannya proses pelaksanaan program pemberdayaan, dan rendahnya kesadaran akan mengembangkan materi pelatihan yang dimiliki. Selain itu, masih minimnya anak jalanan yang memiliki kesadaran untuk bersekolah.

2.4. *State of The Art* tentang Model Kebijakan Pemberdayaan anak Jalanan di Berbagai Kota Besar di Indonesia

1. Kota Banjarmasin

a. Program Penanggulangan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial

Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan bertalian dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Penanggulangan anak jalanan tidaklah sederhana. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam penanggulangan anak jalanan penanggulangan anak jalanan yaitu penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan dan dalam hal pengetahuan sikap dilaksanakan diawali dengan mengawasi jumlah anak jalanan, dimana tempat berkumpulnya, titik-titik keberadaan ataupun kawasan mangkal anak jalanan; Menerima hasil razia oleh Satpol PP; memiliki program pembinaan khusus anak jalanan yang pemberdayaannya di kirim keluar daerah yaitu tempatnya di Bantu Apus Jakarta Timur-SDC (*Social Development Centre*).

Program atau kegiatan penanganan anak jalanan di Kota Banjarmasin adalah penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan dan dalam hal pengetahuan sikap dalam bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, dan pelatihan keterampilan. Program diawali dengan mengawasi jumlah anak jalanan, dimana tempat berkumpulnya, titik-titik keberadaan ataupun kawasan mangkal anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP atau Trantib dan

lain-lain. Hasil razia dikirim ke rumah singgah Sosial Dinas Sosial di Lingkar Basirih. Anak jalanan tersebut memperoleh program pembinaan selama beberapa hari. Selama di rumah singgah mereka mendapatkan layanan kebutuhan dasar dalam bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, dan pelatihan keterampilan. Ketiga upaya promotif, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program Dinas Sosial. Keempat upaya penunjang, melaksanakan tugas-tugas lain yang belum diatur terkait dengan penanganan anak jalanan.

Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam penanggulangan anak jalanan seperti mengawasi jumlah anak jalanan, dimana tempat berkumpulnya, titik-titik keberadaan ataupun kawasan mangkal anak jalanan; Menerima hasil razia oleh Satpol PP; memiliki program pembinaan khusus anak jalanan yang pemberdayaannya di kirim keluar daerah yaitu tempatnya di Bantu Apus Jakarta Timur-SDC (*Social Development Centre*). Bentuk program berupa pembinaan kepribadian sikap, mental dan pelatihan.

b. Pelaksanaan Program Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin

Pelaksanaan program merupakan penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisirnya tujuan dari program tersebut, antara lain pencegahan: dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan kegiatan razia anak jalanan. Rehabilitasi: anak jalanan yang hasil razia didata dan ditampung di rumah singgah yaitu tempat yang memang disediakan untuk membina anak-anak jalanan yang terjaring dalam razia. Pemberdayaan: pemberdayaan ini dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal inilah yang diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan. Pemberdayaan ini dimulai dari tahapan identifikasi atau pendataan anak jalan.

Program Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan mengalami masalah sosial dan atau yang rentan mengalami masalah sosial. Melalui program tersebut diharapkan masalah anak jalanan dapat dituntaskan. Pelaksanaan program penanggulangan anak jalanan ini adalah sebuah pelaksanaan program yang ditujukan kepada anak jalanan yang tergabung dalam program

Penyandang Kesejahteraan Sosial Anak dimana dalam pelaksanaan tersebut memerlukan manajemen yang baik sebagai upaya pemenuhan tujuan yang ditetapkan dan sebagai ketepatan sasaran. Didalam pelaksanaan tersebut memerlukan langkah-langkah yang perlu ditempuh agar semua yang ditetapkan dapat tercapai dan penerapannya dilapangan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan buku Draf Pedoman Operasional Penyandang Kesejahteraan Sosial Anak.

Sedangkan menurut Juita, dkk, (2009:121), penanganan yang bersifat non-yuridis yaitu (1) Melakukan pendataan sekaligus pemetaan secara berkala/periodik terhadap jumlah dan keberadaan anak jalanan; (2) Memberikan penyuluhan tentang urgensi dan eksistensi norma-norma yang harus diikuti oleh setiap manusia sebagai anggota masyarakat; (3) Memberikan berbagai macam latihan keterampilan guna membekali skill kepada anak jalanan; dan (4) Memberikan modal untuk berwiraswasta kepada anak jalanan yang benar-benar menginginkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha sebagai kerja. Seperti berternak ayam, jualan koran dan lain sebagainya.

c. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam penanggulangan anak jalanan yaitu sulitnya pendekatan terhadap anak jalanan ketika akan di data dan dibina. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang bahaya anak berada di jalan menyebabkan keluarga yang tidak melarang anaknya menjadi anak jalanan. Disamping itu kehidupan anak yang bertahun-tahun di jalanan tidak seimbang dengan pembinaan yang dilaksanakan hanya berkisar tiga hari. Sedangkan hambatan lainnya yaitu anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalan dan melakukan aktivitas ekonomi. Dan faktor keluarga, terdapat orangtua yang membiarkan anaknya melakukan aktifitas ekonomi di jalan seperti mengamen dan menyapu kendaraan. Cara mengatasi kendala dalam penanggulangan anak jalanan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus kepada pengendara kendaraan yang beraktivitas di jalan agar mereka tidak memberikan uang kepada anak yang beraktivitas di jalan.

Dalam proses perencanaan suatu program kerja tidak semuanya 100% berhasil atau mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan perencanaan program kerja dinas sosial pada penanganan anak jalanan

dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Banjarmasin tidak lepas dari faktor-faktor yang menghambat dalam proses perencanaan program kerja penanganan anak jalanan di Kota Banjarmasin oleh Dinas Sosial. Keterbatasan dana, faktor anak jalanan maupun tempat pusat pembinaan khusus untuk menampung anak jalanan yang akan diberi sebuah bimbingan, pendidikan dan pelatihan yang akan bermanfaat bagi anak jalanan. Dengan adanya tempat pembinaan akan lebih efektif dalam melakukan pemberdayaan atau rehabilitas pada anak jalanan dengan hasil yang maksimal sehingga anak jalanan benar-benar menekuni dalam pemberian pembinaan, bimbingan, arahan serta pendidikan pelatihan keterampilan bahkan untuk mengawasi atau memantau anak jalanan semangkin maksimal.

Cara mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial dengan memberikan pembinaan kepribadian, disiplin, pengetahuan pendidikan, pelatihan keterampilan agar anak jalanan mampu menangkap apa yang program Dinas Sosial berikan. Partisipasi masyarakat luas dalam pelaksanaan berbagai program memang sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan dari masyarakat maka program-program Dinas Sosial tidak akan memberikan hasil yang memuaskan.

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam penanggulangan anak jalanan yaitu sulitnya pendekatan terhadap anak jalanan ketika akan di data dan dibina. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang bahaya anak berada di jalan menyebabkan keluarga yang tidak melarang anaknya menjadi anak jalanan. Disamping itu kehidupan anak yang bertahun-tahun di jalanan tidak seimbang dengan pembinaan yang dilaksanakan hanya berkisar tiga hari. Sedangkan hambatan lainnya yaitu anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalan dan melakukan aktivitas ekonomi. Dan faktor keluarga, terdapat orangtua yang membiarkan anaknya melakukan aktifitas ekonomi di jalan seperti mengamen dan menyapu kendaraan. Cara mengatasi kendala dalam penanggulangan anak jalanan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus kepada pengendara kendaraan yang beraktivitas di jalan agar mereka tidak memberikan uang kepada anak yang beraktivitas di jalan.

2. Kota Semarang

Strategi pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial adalah dengan bekerjasama dengan LSM. Dalam bentuk rumah singgah atau saat ini telah berganti nama menjadi rumah perlindungan sosial anak

(RPSA) yang berawal dari kerjasama antara departemen sosial RI dengan UNDP untuk menangani kasus anak jalanan di Indonesia yaitu mengajukan suatu modal untuk mengentaskan anak jalanan yakni dengan model rumah perlindungan sosial anak.

Dinsospora Kota Semarang dalam melakukan pemberdayaan anak jalanan bekerjasama dengan 4 RPSA yaitu RPSA anak bangsa, RPSA pelangi, RPSA gratama, dan RPSA YKSS. Bentuk kerjasama DINSOSPORA dengan RPSA dalam pemberdayaan anak jalanan kota Semarang adalah penjangkaran anak jalanan yang dilakukan oleh keempat RPSA yang dibagi menjadi lima wilayah penjangkaran yaitu;

- a. RPSA anak bangsa di wilayah Semarang tengah dan Semarang barat
- b. RPSA pelangi di wilayah Semarang timur
- c. RPSA gratama di wilayah Semarang selatan
- d. RPSA YKSS di wilayah Semarang utara

Berikut beberapa strategi yang digunakan oleh Dinsospora untuk memberdayakan anak jalanan di Kota Semarang:

a. Strategi S-T

- 1) Peningkatan Peran RPSA untuk mengubah watak dan karakter anak jalanan

Peran serta RPSA dalam strategi pemberdayaan anak jalanan adalah sebagai partner untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang anak jalanan yang disediakan sebagai perantara untuk anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Program-program RPSA antara lain :

- a) Melakukan proses informal, memberikan perlindungan dan pengarahannya sesuai norma masyarakat yang ada kepada anak jalanan.
- b) Mendampingi anak-anak jalanan
- c) Menjadi tahap awal dari pihak yang akan membantu anak jalanan.

Adapun program kegiatan yang dilakukan oleh RPSA di dalam strategi pemberdayaan anak jalanan.

- a) Pemberian beasiswa untuk anak jalanan dan anak terlantar
- b) Pelatihan keterampilan untuk anak jalanan
- c) Pemberian makanan untuk anak jalanan

- 2) Peningkatan kesadaran, peran serta dan pandangan masyarakat oleh Dinsospora

Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan program Dinsospora menjadi kurang efektif dan maksimal, maka sangatlah penting jika masyarakat sekitar anak jalanan yang akan diberdayakan juga diberi pengarahan agar membantu mensukseskan program dari pemerintah Kota Semarang untuk menangani masalah anak jalanan.

b. Strategi W-O

- 1) Pemberdayaan orangtua anak jalanan untuk mendapatkan pekerjaan guna peningkatan ekonomi keluarga (keluarga anak jalanan)

Orangtua anak jalanan sampai saat ini masih belum tersentuh. Orangtua anak jalanan yang seharusnya juga mendapatkan perhatian lewat program - program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinsospora sampai saat ini masih belum tersentuh.

Peran orangtua sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta memenuhi hak-hak anak dalam keluarga seperti perhatian kasih sayang, kesehatan dan pendidikan demi masa depan yang lebih baik untuk anaknya tidak dapat diwujudkan akibat dari faktor kemiskinan sehingga akhirnya mendorong anak untuk membantu ekonomi keluarga untuk mendapatkan uang tetapi karena pendidikan yang rendah dan tidak memiliki ketrampilan akhirnya anak turun ke jalan.

Oleh karena itu pemberdayaan orang tua sangat diperlukan. Melalui pemberdayaan ini diharapkan orang tua anak jalanan dapat memiliki ketrampilan yang akhirnya bisa memperbaiki kualitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk pemberdayaan orang tua sangat diperlukan. Pemberdayaan orang tua anak jalanan dapat berupa pemberian ketrampilan dan bantuan modal usaha bagi orang tua anak jalanan serta penyuluhan dan mengubah sudut pandang orang tua anak jalanan tentang tanggung jawab sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak dan tidak memperkerjakan anak ke jalanan untuk mendapatkan uang untuk membantu ekonomi keluarga.

2) Peningkatan Anggaran dalam penanganan anak jalanan di Kota Semarang

Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk anak jalanan di Kota Semarang menjadikan penanganan anak jalanan menjadi terhambat. Alokasi anggaran anak jalanan saat ini hanya berbentuk program pemberian ketrampilan bagi anak jalanan. Rumah Perlindungan Anak sebagai mitra pemerintah semenjak tahun 2009 sampai saat ini sangat merasakan akibat dari keterbatasan anggaran sehingga program-program yang dilakukan oleh RSPA menjadi terhenti sebatas penjangkauan anak jalanan saja, tidak ada lagi program pendampingan dan pemberdayaan bagi anak jalanan yang dilaksanakan di dalam RSPA. Selain itu program pemberdayaan orang tua anak jalanan juga tidak bisa terealisasi akibat anggaran yang tidak memadai. Oleh karena itu diperlukan penambahan anggaran dalam program penanganan anak jalanan sehingga program-program yang dilaksanakan dapat terwujud seperti pemberdayaan orang tua anak jalanan dan peran RSPA sebagai tempat pendampingan dan pemberdayaan bagi anak jalanan.

Keseriusan pemerintah kota Semarang dalam mewujudkan Semarang sebagai kota layak anak yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010 – 2015 menjadikan permasalahan anggaran dapat diatasi sehingga penanganan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinsospora kota Semarang yang dibantu oleh RSPA dapat berjalan dengan baik tanpa terkendala masalah keterbatasan anggaran.

c. Strategi W-T

1) Pengusulan Pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanganan anak jalanan di Kota Semarang

Belum adanya peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum yang mengatur tentang anak jalanan di kota Semarang membuat pelaksanaan program penanganan anak jalanan seringkali tidak dapat berjalan dengan baik. Kehadiran anak jalanan di kota Semarang merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan daerah kota Semarang yang mengatur tentang anak jalanan dimana Dinsospora dapat mengusulkan pembuatan perda kepada legislatif yang mengatur tentang teknis pelaksanaan dalam penanganan anak jalanan mulai dari penjangkauan anak sampai kepada pemberian pelatihan ketrampilan serta monitoring dan

evaluasi program dan juga pola koordinasi yang baik dalam pembagian tugas dan wewenang dengan SKPD terkait dalam penanganan anak jalanan maupun dengan lembaga swadaya masyarakat sebagai rekan kerja pemerintah agar dalam perjalanannya tidak terjadi overlapping dalam pelaksanaan tugas. Selain itu juga dijelaskan tentang tanggung jawab keluarga dalam pemenuhan hak-hak dasar anak seperti kasih sayang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, Dan juga peran serta dari masyarakat dalam mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti tidak memberikan uang secara langsung kepada anak jalanan yang menjadikan anak jalanan semakin bertambah banyak. Dalam pengusulan penyusunan perda sebaiknya juga diperhatikan tentang pemberian sanksi hukum yang tegas kepada masyarakat dan anak jalanan agar menimbulkan efek jera dan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik sehingga cita-cita pemerintah kota Semarang untuk menjadikan kota Semarang menjadi kota layak anak dapat terwujud.

3. Kota Pontianak

Sebagai upaya untuk menanggulangi keberadaan anak jalanan di kota-kota besar, Pemerintah Kota Pontianak lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Hal ini dilakukan agar mereka mendapatkan perlindungan secara utuh juga untuk mendapatkan predikat kota layak anak bagi Pemerintah Kota Pontianak.

a. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk Melindungi Anak-Anak Jalan

Sebelum melihat bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota pontianak terhadap anak-anak jalanan, maka kriteria anak jalan harus terlebih dahulu dipahami. Menurut Departemen Sosial RI² Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia

mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

Terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota pontianak terhadap anak-anak jalanan, secara umum terjadi apabila anak-anak tersebut terkait atau tersangkut masalah-masalah pidana. Misalnya melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang kecanduan obat-obatan terlarang, memberikan advokasi terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau telah menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis, atau bisa jadi juga karena penjualan anak-anak dibawah umur untuk melakukan pelacuran dan lain sebagainya.

Akan tetapi, jika anak-anak jalan tersebut tidak tersangkut perihal apapun, tampaknya pemerintah kota pontianak kurang peduli. Hal ini dapat dilihat masih eksisnya anak-anak jalanan tersebut yang setiap hari baik siang dan malam dapat dilihat tanpa ada pengawasan dari pemerintah kota pontianak dalam hal ini instansi yang terkait.

b. Faktor-Faktor Penyebab Pemerintah Kota Pontianak Belum Optimal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah kota pontianak belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan :

- 1) Lemahnya pengawasan oleh instansi terkait.
- 2) Kurangnya koordinasi antar instansi.
- 3) Perilaku Hidup Anak Jalanan

- 4) Bukan Penduduk Kota Pontianak.
- 5) Kurangnya Peran Komisi Perlindungan Anak.

c. Langkah-Langkah Strategis Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pontianak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalanan

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan umum dan bersifat makro pembangunan daerah yang merupakan jabaran pembangunan kota Pontianak dalam upaya mencapai visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk periode perencanaan 20 tahun ke depan. Dokumen perencanaan ini untuk mengikat kesinambungan program apabila terjadi pergantian kepemimpinan daerah, agar kesinambungan dan konsistensi kebijakan daerah bisa lebih terjamin. Kesinambungan dan konsistensi kebijakan tidak hanya menjadi harapan investor, tetapi masyarakat dan perangkat daerah tidak menimbulkan kebingungan.

Visi dan misi disini adalah visi –misi daerah yang akan dipakai sebagai pedoman calon kepala daerah dalam proses pemilihan kepala daerah. Penjabaran lebih detail RPJP akan diterjemahkan dalam RPJM setiap pelantikan dan pergantian kepala daerah, berikutnya akan diikuti dengan perubahan rencana strategis (renstra) masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan tiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diikuti dengan rencana penganggaran.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2015-2019, Bidang Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai program : a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak.

Melihat RPJPD dan RPJMD yang telah disusun oleh pemerintah kota pontianak, tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan perlindungan anak telah menjadi bagian tersendiri dari program pembangunan daerah. artinya langkah-langkah strategis telah ditetapkan dan lembaga atau badan yang menangani perlindungan anak juga sudah terbentuk, akan tetapi langkah-langkah strategis ini pada tataran implementatif kurang diterjemahkan oleh badan atau lembaga yang bersangkutan. khususnya penanganan anak-anak jalanan.

Sebenarnya pemerintah kota pontianak telah membuat kebijakan melalui intruksi walikota untuk memulangkan warga pendatang yang tidak mempunyai tujuan dan pekerjaan untuk datang ke pontianak. Tujuannya adalah untuk membuat kota pontianak berhasil dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai sebagai “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

4. Kota Yogyakarta

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan tidak melupakan bahwa terdapat Hak Asasi Manusia dan hak anak di dalamnya. Maka Pemerintah Kota Yogyakarta mencoba memenuhi hak-hak tersebut, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan anak jalanan adalah :

- a. Upaya pencegahan Dinas Sosial Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta penjangkauan anak jalanan di berbagai titik lokasi yang biasa terdapat aktivitas anak jalanan sehingga anak jalanan dapat ditindaklanjuti dan kemudian diberikan pembinaan yang tepat
- b. Upaya pemenuhan hak yang dilakukan oleh Dinas Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan yaitu secara terpadu dengan melibatkan Disnakertrans dari bidang social sendiri kemudian dengan adanya program LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang mendapatkan dana dari APBN (Anggaran Pembelanjaan Negara) dari Kementerian Sosial bisa dinikmati oleh anak-anak jalanan yang dikategorikan sebagai anak yang terlantar.
- c. Upaya reintegrasi social yang dilakukan oleh Dinas Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan yaitu dengan menyatukannya anak-anak itu ke keluarganya dan masyarakat agar bisa kembali ke kehidupan semula yang sewajarnya seorang anak tanpa adanya diskriminasi dari lingkungan.

Pelaksanaan perlindungan anak yang hidup di jalan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui upaya pencegahan, upaya penjangkauan, upaya pemenuhan hak dan upaya reitegrasi social sudah sesuai namun belum sepenuhnya menyadarkan masyarakat dalam menikapi masalah anak jalanan ini, hal ini dikarenakan :

- a. Kurangnya upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kampanye, edukasi dan informasi masih kurang

diantaranya masalah sosialisasi tentang tanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan pengasuhan anak di dalam keluarga, bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan.

- b. Kurangnya upaya pemerintah dalam pemenuhan hak bagi anak khususnya pada pemenuhan hak identitas anak, pemenuhan hak bantuan hukum dan ini sangat penting bagi anak jalanan yang tidak diketahui orang tua dan asalnya
- c. Kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan ketentuan larangan seperti yang diterangkan dalam Peraturan Daerah pada pasal (43) dan terlalu beratnya ketentuan denda yang diberikan seperti yang diterangkan pada pasal (46 dan 47) dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang hidup di jalan.

Upaya Pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan anak yang hidup di jalan ini tidak terlepas dari kendala-kendala seperti :

- a. Budaya masyarakat yang mudah dan merasa iba (kasihan) untuk member uang dan kemudian hal ini lah yang menjadikan sebagai penyakit karena berdampak malas untuk bekerja dan menjadikan mengemis sebagai pekerjaan tetap.
- b. Banyaknya orang tua yang tidak mengetahui kewajibannya dan hak-hak anak untuk mendapatkan hak identitas, hak atas pengasuhan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

2.5. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Anak Jalanan

2.5.1. Landasan Hukum Pemberdayaan Anak Jalanan

Mengacu pada UU 23/2002 dan UU 35 tahun 2014, anak harus mendapat perlindungan yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 18. Anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan fisik, psikis, rohani dapat dikategorikan sebagai anak terlantar. Para pekerja Sosial banyak mengutip ciri-ciri anak terlantar pada Keputusan Menteri Sosial RI No 27 Tahun 1984 antara lain anak usia 5-18 tahun (dalam banyak kasus anak dibawah usia 5 tahun juga banyak ditelantarkan orang tuanya), tidak memiliki ayah (yatim) atau Ibu (piatu) tanpa diwarisi harta benda yang dapat dikelola untuk menuntut ilmu, orang tua sakit-sakitan, orang tua tidak memiliki penghasilan cukup, tidak memiliki tempat tinggal, yatim-piatu di mana kondisinya tidak memiliki saudara yang memberikan perlindungan dasar, tidak terpenuhi kebutuhan dasar dan anak yang lahir tidak diinginkan karena korban pemerkosaan.

Banyak istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebut anak terlantar. Istilah yang lazim kita dengar dan sangat stereotip adalah istilah anak jalanan. Anak-anak jalanan merujuk pada anak-anak yang menghabiskan waktu dan aktivitasnya di jalanan. Banyak pihak termasuk penulis tidak sepakat dengan penggunaan istilah “anak jalanan” karena istilah tersebut menyudutkan posisi anak. Data Kementerian Sosial tahun 2015, jumlah anak jalanan (maksudnya pekerja anak sektor non formal di jalan-jalan) sebanyak 33.400 yang tersebar di 16 Provinsi. Persebaran anak-anak terlantar yang menghabiskan hidupnya di jalanan terbesar di Pulau Jawa. Propinsi DKI Jakarta menempati urutan teratas dengan anak-anak terlantar paling banyak yakni 7600 anak. Propinsi lainnya yang banyak anak terlantar yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan estimasi anak terlantar yang hidup di jalan sebanyak masing-masing propinsi 5000-an sedangkan di Jawa Timur sebanyak 2000-an.

Dari ribuan anak terlantar tersebut di atas, data Kemensos RI (2016) hanya sekitar 6000-an anak yang mendapat perlindungan dan layanan Program Kesejahteraan Anak. Selebihnya anak-anak terlantar ini hidupnya sangat rentan dengan kekerasan, penyakit menular dan penyakit tidak menular oleh sebab gizi buruk, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Pemerintah sendiri punya komitmen menjadikan Indonesia bebas anak jalanan di akhir tahun 2017.

Pemerintah RI telah menunjukkan adanya *political will* dalam mengimplementasikan mandat konstitusi UUD 1945 terkait dengan perlindungan anak terlantar. Konstitusi kita tegas menyebutkan bahwa anak terlantar di pelihara oleh Negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Dasar Negara Indonesia yakni Pancasila sila ke lima dan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesejahteraan. Prinsip keadilan sosial mengamanatkan kepada Pemerintah untuk bertanggung jawab mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Pasal 28H ayat 3 UUD 1945 menyatidakan Negara memberi jaminan sosial kepada seluruh warga Negara untuk mengembangkan diri. Perlindungan sosial ini secara global juga dijamin dalam deklarasi HAM pada 10 Desember 1948 dan Konvensi ILO Nomor 102 tahun 1952. Regulasi dalam negeri sendiri yang mengatur tentang Sistem Perlindungan Sosial tertuang dalam TAP MPR No X/MPR/2001, Kepres Nomor 20 Tahun 2002, UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Perlindungan anak terlantar harusnya dilakukan oleh Pemerintah secara terintegrasi dan holistik yang melibatkan banyak sektor. Dalam struktur Pemerintahan, setidaknya terdapat delapan kementerian/ Lembaga yang memiliki tupoksi layanan dan perlindungan anak. Delapan

kementerian/lembaga tersebut antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BKKBN, KPAI dan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki struktur melayani masalah kependudukan sampai tingkat Kecamatan. Selain Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah harus tanggap dengan adanya anak-anak terlantar di daerahnya masing-masing.

Pemerintah daerah harus melakukan pendataan anak-anak terlantar. Pendataan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pada pencatatan kependudukan. Satu contoh yang selama ini dianggap sepele warga masyarakat adalah hak anak terhadap akte lahir. Setiap anak dari semua latar belakang, termasuk anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya oleh karena ia dibuang atau hasil pemerkosaan, ia tetap berhak atas akte lahir sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Anak yang tidak memiliki akte lahir, ia akan sulit memperoleh perlindungan dari Negara. Ia akan menghadapi berbagai macam masalah terkait dengan hak-haknya seperti misalnya haknya mendapat identitas dalam Kartu Keluarga, KTP, dan seterusnya sampai jaminan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Anak terlantar harus menjabat jaminan pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial lainnya. Sistem perlindungan sosial yang ada saat ini sebagaimana diatur dalam UU No 40 tahun 2004 yang secara teknis diwujudkan berbentuk “kartu-kartu” itu masih banyak menysasar orang dewasa sedangkan anak-anak kerap terabaikan. Banyak anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memperoleh jaminan kesehatan karena sistem jaminan selama ini “dipahami” hanya untuk orang dewasa. Di sinilah cacatan pentingnya, anak-anak sejak lahir harus mendapat perlindungan. Perlindungan di bidang pendidikan juga sama. Sejak lahir, anak-anak yang rentan hidup terlantar harus tercatat sebagai penerima jaminan pendidikan. Jika Pemerintah memiliki data terpadu kependudukan, maka anak-anak terlantar ini pastinya mendapat layanan perlindungan tidak hanya pendidikan, kesehatan namun juga layanan public seperti angkutan gratis.

Selain memberikan edukasi, intervensi program yang dapat dilakukan Pemerintah adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Keluarga yang berdaya secara ekonomi diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak. Pemberdayaan ekonomi keluarga ini bukan sesuatu yang mudah dilakoni ketimbang memberikan edukasi berupa penyuluhan. Pemberdayaan ekonomi keluarga mencakup “keahlian/skill” dalam produksi barang/jasa, modal, barang/jasa itu sendiri, packaging dan

pasar. Meski pemberdayaan ini kesannya sulit dan membutuhkan waktu lama namun dalam pandangan penulis tetap harus dijalani oleh Pemerintah untuk menyelamatkan generasi masa depan yakni anak-anak.

1. Pengasuhan Alternatif

UU No 23 tahun 2002 dan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 7 mengatur ketentuan bagi anak yang karena sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh-kembang maka ia berhak di asuh atau diangkat orang lain. Pengangkatan anak harus memegang prinsip kepentingan terbaik anak dan tidak memutus hubungan anak dengan orang tuanya.

Anak-anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam UU 23/2002 dan UU 35/2014 pasal 59 yakni anak dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari suku minoritas atau terisolasi, anak korban eksploitasi (ekonomi maupun seksual), anak korban trafficking, anak korban Narkoba, anak korban penculikan, anak korban kekerasan dan sebagainya harus mendapat layanan khusus di pusat rehabilitasi maupun di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA). Anak terlantar yang membutuhkan perlindungan khusus ini jika mengacu pada pasal 59A UU 35 tahun 2014 maka semua stake holder harus bergandeng tangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun elemen masyarakat lainnya.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara.

Gepeng, anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak-anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tetapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi Fakir miskin dapat

dikendalikan orang yang harus kita bantu kehidupannya dan pemerintahlah yang seharusnya lebih peka akan keberadaan mereka.

Berbanding terbalik dengan amanat UUD 1945, di berbagai media menunjukkan penertiban gepeng dan anak jalanan tidak berlandaskan nilai kemanusiaan, mereka di paksa bahkan sampai mereka berasa sakit ketika digiring oleh petugas ke mobil penertiban, seperti menangkap ayam, lalu mereka dibawa di tempat rehabilitasi sosial untuk di data dan setelah itu dilepaskan kembali dan lagi - lagi menghiasi jalanan, perempatan lampu merah, bus, tempat ibadah dan tempat keramaian lainnya. Sedikit sekali dari mereka-gepeng dan anak jalanan yang diberdayakan atau disekolahkan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan undang - undang tentang pelarangan pemberian uang dan apapun dengan tujuan menekan angka gepeng dan anak jalanan, tetapi tetap saja tidak efektif. Siklus itu tetap berjalan walaupun tanpa hasil yang nyata untuk memelihara atau memberdayakan dan mengurangi jumlah gepeng dan anak jalanan.

2.5.2. Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Anak Jalanan

Upaya menangani anak jalanan, tidak bisa dilakukan secara parsial atau diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah semata melainkan perlu penanganan dan kepedulian bersama dan kerjasama semua warga, dalam hal ini pemerintah, perguruan tinggi, swasta maupun masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Freeman (1984) bahwa stakeholders merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Stakeholders utama dalam penanganan anak jalanan selain pemerintah adalah perguruan tinggi.

Dinas Sosial Kementerian Sosial mempunyai peran besar dalam menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan Dinas Sosial mengemban tugas pokok dan fungsi jabatan yang termaktub dalam peraturan daerah No 2 Tahun 2005 yaitu bagian keempat Bidang Rehabilitasi Sosial Pasal 10 yaitu : 1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, penderita cacat dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba. 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi

penyandang cacat dan tuna susila (gelandangan, pengemis, eks napi, tuna susila, waria, anak nakal dan anak jalanan); b) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi sosial penyandang cacat; c) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (gelandangan, pengemis, eks napi, tuna susila, waria, anak nakal dan anak jalanan).

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya. Pemberdayaan terhadap anak jalanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga membentuk inisiatif, kreatif, kompeten, inovatif untuk mengantarkan mereka kepada kemandirian. Dalam pemberdayaan tersebut Dinas Sosial sebagai mediator memberikan kegiatan pemberdayaan guna membangkitkan kembali rasa percaya diri, agar dapat aktif dalam kehidupan sosial, serta terciptanya kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan anak jalanan merupakan program untuk meminimalisir keberadaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Adapun program pemberdayaan yang diberikan berupa bimbingan agama, bimbingan orang tua anak jalanan, bimbingan kesehatan dan bimbingan keterampilan. Menurut Puji Karyanto pemberdayaan anak-anak jalanan memang telah banyak dilakukan, namun pemberdayaan anak-anak jalanan yang mengedepankan skill menulis yang selain dapat menjadi ajang ekspresi pengalaman dan curahan perasaan juga dapat dijadikan satu bekal untuk pengembangan character building mereka sekaligus bekal untuk pengembangan jiwa entrepreneurship yang dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka, masih sangat jarang ditemukan.¹³ Program Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan mengalami masalah sosial dan atau yang rentan mengalami

masalah sosial. Melalui program tersebut diharapkan masalah anak jalanan dapat dituntaskan. Pelaksanaan program penanggulangan anak jalanan ini adalah sebuah pelaksanaan program yang ditujukan kepada anak jalanan yang tergabung dalam program Penyandang Kesejahteraan Sosial Anak dimana dalam pelaksanaan tersebut memerlukan manajemen yang baik sebagai upaya pemenuhan tujuan yang ditetapkan dan sebagai ketepatan sasaran. Didalam pelaksanaan tersebut memerlukan langkah-langkah yang perlu ditempuh agar semua yang ditetapkan dapat tercapai dan penerapannya dilapangan dapat berjalan dengan baik.

2.5.3. Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Pada zaman Pasca Kemerdekaan dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1946, wewenang Kepolisian Pangreh Praja sebagai penanggungjawab kepolisian berkurang. Kekuasaan tertentu diserahkan kepada Kepolisian. Kemudian pada Oktober 1948 Satpol PP didirikan di Yogyakarta dengan dasar Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi. Setelah itu, Satpol PP resmi dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1950 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/1950. Adapun nama Satpol PP ketika itu adalah Detasemen Polisi Pamong Praja.

1. Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan Satpol PP

Eksistensi Satpol PP diatur dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatidakan Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP berada dibawah kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 5 PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

PP No. 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, wewenang Satpol PP adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Permendagri No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki 6 tugas khusus dan memiliki prosedur operasional, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol, dan operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan peraturan daerah.

Otonomi daerah yang sangat luas dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memiliki dampak Satpol PP memiliki peranan yang sangat besar dalam roda pemerintahan daerah. Daerah berpacu untuk melaksanakan pembangunan karena urusan pusat menurut Pasal 10 ayat (3) hanya meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, serta kewenangan lain yang ditentukan UU. Satpol PP akhirnya dijadikan instrument garis depan untuk penegakan perda, pengawal pembangunan, dan seakan-akan Pemda merasa memiliki kepolisian sendiri dan menafikan eksistensi kepolisian.

2.5.4. Peran Kepolisian

Idealnya kepolisian sebagai pengemban tugas pokok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat diseluruh wilayah Indonesia juga meningkatkan kapasitas peranannya sebagai penolong. Dalam hal ini mengingat setiap aspek sosial, ekonomi maupun budaya memberikan implikasi terhadap Kamtibmas, maka perlu adanya inisiatif dari kepolisian melakukan program-program kreatif untuk meminimalisir resiko gangguan keamanan yang muncul akibat permasalahan sosial seperti masalah anak jalanan.

Oleh karena itu diharapkan program unggulan “Polisi Peduli Pendidikan” dapat diadaptasi oleh seluruh satuan kerja Polri di Indonesia. Hal ini berpijak pada kenyataan bahwa pada prinsipnya masalah sosial anak jalanan menghantui hampir seluruh kota besar di Indonesia dan mengakar pada permasalahan utama yaitu kemiskinan dan tekanan ekonomi. Sehingga jika kepolisian secara sukarela berinisiatif untuk melaksanakan program nyata yang dapat diarahkan untuk membina dan mendidik para anak jalanan.

Hal ini tidak berarti kepolisian secara sepihak mengambil alih tugas dan wewenang instansi lain, tetetapi dalam hal ini kepolisian merealisasikan sinergi polisional dengan merangkul kontribusi masyarakat, korporasi dan stake holder lainnya yang memiliki kemampuan lebih untuk ikut memberikan kontribusi dan kepedulian terhadap masalah sosial yang terjadi di sekitarnya.

Untuk itu maka langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan program “polisi peduli pendidikan” oleh setiap satuan kerja Polri di kewilayahan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan kepada stake holder potensial yang memiliki kemampuan finansial dari mulai perusahaan BUMN, perusahaan swasta, yayasan, individu pengusaha, badan amal dan sebagainya untuk dijalin kerjasama dalam penyelenggaraan program “polisi peduli pendidikan” dengan memberdayakan program CSR (corporate social responsibility) dan sumber lainnya yang mana dalam hal ini kepolisian hanya memfasilitasi perencanaan program, sementara pelaksanaan program diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemberi dana.
2. Menyusun perencanaan program yang ditekankan pada penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan anak-anak jalanan untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan.
3. Memberdayakan peran Bhabinkamtibmas untuk melakukan pendataan anak-anak usia sekolah yang mencakup anak-anak berprestasi namun kurang mampu dan rawan putus sekolah, anak-anak yatim putus sekolah

hingga anak-anak jalanan yang tidak memiliki keluarga pendukung. Hal ini disertai dengan koordinasi bersama dinas-dinas terkait pemerintah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program yang dilaksanakan pemerintah dan menciptakan suatu kolaborasi program agar berjalan lebih efektif.

4. Melakukan kerjasama dan rekrutmen relawan sebagai tenaga pendidik bagi anak-anak jalanan baik dari kalangan mahasiswa, guru, pemuda, LSM dan elemen masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian untuk membantu pembinaan dan pendidikan bagi anak jalanan.
5. Menggelar program-program nyata pendidikan dan pembinaan anak-anak jalanan yang meliputi pelaksanaan program beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi namun kurang mampu untuk meneruskan pendidikan hingga jenjang tertentu. Melaksanakan program “sekolah terbuka” di setiap kelurahan bagi anak-anak jalanan dengan melibatkan relawan dan mengedepankan peran Polsek sebagai fasilitator kegiatan sekolah terbuka anak jalanan. Melaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan bagi anak-anak jalanan usia remaja yang putus sekolah agar memiliki bekal keterampilan untuk dipekerjakan pada sektor informal seperti kegiatan kerajinan, otomotif maupun perdagangan.

Dengan adanya program nyata yang dicanangkan kepolisian berupa program “Polisi Peduli Pendidikan” maka diharapkan hal ini dapat menjadi secerah cahaya bagi anak-anak yang berada dalam kondisi kurang beruntung guna menyongsong kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. Pada saat yang bersamaan hal ini juga akan mengurangi masalah sosial yang mengarah pada terjadinya gangguan Kamtibmas.

2.5.5. Peran SKPD Terkait

Menurut Jones dalam Selviyanna (2012:44) *stakeholder* dapat diklarifikasi kedalam dua kategori, yaitu: a. *Inside Stakeholder*, terdiri dari pihak yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumberdaya perusahaan secara berbeda didalam organisasi perusahaan, seperti pemegang saham, para manager, dan karyawan. b. *Outside Stakeholder*, terdiri dari orang-orang atau pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pola karyawan perusahaan tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti pelanggan, costumers, pemasok, pemerintah (*government*), masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum (*general public*).

Berdasarkan pendapat ahli yang menyebutkan kategori stakeholder sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa stakeholder dalam penelitian ini termasuk kedalam kategori outside stakeholder, karena stakeholder yang berkoordinasi dalam menangani anak jalanan dipengaruhi oleh keputusan atau kepentingan bersama. Beberapa SKPD yang bisa diajak untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan guna meningkatkan kemandirian di Surabaya yaitu: (1) Dinas Pendidikan; (2) Dinas Kesehatan; (3) Dinas Pemuda dan Olahraga; (4) Dinas Kebersihan; (5) Linmas/Satpol PP; (6) Pusat Pendidikan dan Pelatihan; (7) KONI Surabaya.

2.6. Hasil Penelitian Sebelumnya dan Studi Pendahuluan yang telah dilakukan

Terdapat beberapa konsep mengenai konsep pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian mereka. Setiap pemerintahan, lembaga/ yayasan atau masyarakat memiliki masing-masing cara untuk memberdayakan anak jalanan. Dari penelitian Hamidi (2018) menunjukkan bahwa Panti Asuhan Mizan Amanah Perumnas Klender Jakarta Timur memilih memberdayakan anak jalanan melalui pelatihan pembuatan souvenir. Panti asuhan ini melakukan pemberdayaan anak jalanan melalui tiga tahap yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi pengetahuan hingga peningkatan intelektualitas. Panti asuhan ini berhasil mengubah pola pikir mereka melalui motivasi, sehingga anak-anak jalanan mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan siap untuk menjadi pribadi yang mandiri.

Beberapa program keterampilan seringkali dipilih oleh lembaga/ yayasan/ panti untuk membekali anak jalanan agar menjadi mandiri. Bahkan pemerintah kabupaten/kota pun juga memilih program semacam ini untuk menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi anak jalanan. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosialnya, mereka mengimplementasikan program latihan keterampilan dan praktek belajar kerja, baik untuk bidang perbengkelan sepeda motor maupun service *handphone* dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan (Suardana, 2013). Hasilnya anak jalanan merasa pelatihan tersebut bermanfaat bagi dirinya dan membantu dalam menumbuhkan kemandirian hidup (penemuan diri dan kepercayaan diri) serta mampu membuka kegiatan usaha yang bisa memberikan manfaat ekonomi bagi diri dan keluarganya.

Penelitian lain dilakukan oleh Oktaviany (2010) yang menunjukkan model pemberdayaan anak jalanan melalui program sekolah otonom yang dilakukan oleh Sanggar Anak Akar, Gudang Seng, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Proses belajar mengajar di Sanggar Anak Akar ini tidak jauh berbeda

dengan sekolah formal lainnya, hanya ditambahkan pelajaran music dan keterampilan. Dengan demikian, anak jalanan dapat meningkatkan kapasitas intelektualnya serta menyalurkan bakat dan keterampilan yang dimiliki. Hasil menunjukkan terjadinya perubahan yang dirasakan anak jalanan dan peningkatan kreatifitas dan keterampilan mereka.

Penelitian lain dilakukan oleh Rahmaveda (2017) tentang pemberdayaan anak jalanan di kota Surabaya. Menurutnya, sangat penting dibutuhkan sinergitas antar stakeholder dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan untuk anak jalanan belum dilaksanakan dengan baik karena prinsip kesetaraan, partisipasi dan keberlanjutan belum sepenuhnya dilaksanakan. Lebih jauh, hubungan kerja sama antara Dinas Sosial Kota Surabaya, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Shelter Anak Bangsa Wonorejo, Rumah Singgah Alang-alang dan Rumah Singgah Kharisma kurang sinergis. Hal ini disebabkan oleh kurangnya interaksi yang intensif di antara mereka dan kurangnya partisipasi aktif dalam proses koordinasi perencanaan, implementasi dan evaluasi program pemberdayaan. Akhirnya berdampak pada buruknya pertumbuhan kemandirian pada anak jalanan yang telah dilatih, berdasarkan tingkat kemandirian intelektual yang rendah dan kemandirian belajar dari setiap anak jalanan.

Sungguh disayangkan jika sinergitas itu tidak berjalan, padahal dalam penelitian Sarmini & Sukartiningih (2018) disebutkan bahwa UPTD Shelter Anak Bangsa sebagai pusat pemberdayaan anak jalanan di Surabaya memiliki enam peran penting bagi anak jalanan yaitu 1) memenuhi kebutuhan primer, 2) memenuhi hak-hak pendidikan, 3) membina mental spiritual, 4) membangun integritas, 5) membangun jaringan dan 6) mengembangkan budaya prestasi. Enam peran ini menunjukkan bahwa UPTD Shelter Anak Bangsa sebagai pusat pemberdayaan anak jalanan di Surabaya telah melaksanakan fungsinya dengan baik untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan.

Berbagai studi terkait dengan pemberdayaan anak jalanan sebagaimana tersebut diatas, masih menunjukkan model-model pemberdayaan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan, belum menunjukkan sebuah sinergitas koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat, Pihak Swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam pemberdayaan anak jalanan. Penelitian yang diajukan ini bersifat komprehensif mengembangkan model pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan. Penelitian ini memfokuskan subyek penelitian pada UPTD Shelter Anak Bangsa sebagai pusat pemberdayaan anak jalanan di Surabaya. Penelitian ini akan membangun model pemberdayaan anak jalanan yang komprehensif dan sinergis antara Shelter Anak Bangsa dengan SKPD lainnya, LSM,

Perguruan Tinggi, Pihak Swasta dan Masyarakat. Model ini memiliki dimensi penting sebagai pijakan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan di Surabaya pasca lulus dari Shelter Anak Bangsa.

2.7. Program Kerja Shelter Anak Bangsa

Terdapat beberapa program kerja yang dimiliki Shelter Anak Bangsa, yaitu: assesmen, orientasi, intervensi dan evaluasi.

1. Assesmen

Assesmen merupakan proses kritis dalam praktik pekerjaan sosial. Penentuan tujuan dan intervensi amat tergantung pada assesmen. Assesmen yang tidak tepat atau tidak lengkap mungkin akan berakibat pada penetapan tujuan yang tidak tepat dan penetapan intervensi yang tidak tepat. Karena asesment yang dibuat tidak tepat atau tidak lengkap, perubahan positif yang diharapkan dari klien nampaknya tidak akan terjadi.

Assesmen merupakan rentang yang luas dan termasuk penilaian mengenai potensi, kebutuhan dan jaringan sosial klien yang menentukan cakupan dan beratnya masalah (Ridley, Li & Hill, 1998). Assesmen menjadi proses untuk menyimpulkan hasil pengukuran melalui analisis yang sistematis dengan menggunakan kriteria seperti baik, buruk, cocok tidak cocok sesuai dengan penilaian kriteria masing-masing (Dariyanto 2010). Asesmen terkadang menunjukkan sebagai suatu *psychosocial diagnosis* (Hollis, 1972). Namun istilah diagnosis terfokus pada apa kesalahan klien, keluarga, atau kelompok yang didiagnosis-seperti mengidap penyakit, masalah disfungsi dan mental.

Hepworth and Larsen (1986) menjelaskan asesmen sebagai berikut: Asesmen adalah proses pengumpulan, penganalisaan dan mensistisasikan data kedalam suatu formulasi yang menekankan dimensi vital sebagai berikut: (1) sifat permasalahan klien, termasuk perhatian khusus terhadap peran-peran yang klien dan hal penting lainnya yang sulit dijalankan, (2) keberfungsian klien (kekuatan, keterbatasan, aset pribadi dan kekurangan) serta hal penting lainnya, (3) motivasi klien untuk mengatasi masalah, (4) relevansi faktor lingkungan yang turut mendukung timbulnya masalah, dan (5) sumber-sumber yang tersedia atau dibutuhkan untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan klien

Assesmen merupakan kegiatan penelaahan dan pengungkapan masalah untuk mengetahui semua permasalahan klien, menetapkan rencana dan pelaksanaan intervensi. Kegiatan assesmen meliputi:

- a. Menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan klien.
- b. Melaksanakan diagnosa permasalahan

- c. Menentukan langkah-langkah rehabilitasi
- d. Menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan
- e. Menempatkan klien dalam proses rehabilitasi

Adapun tahap assesmen yang dilakukan di dalam Shelter Anak Bangsa adalah sebagai berikut:

- a. Assesmen sosial, adalah proses pengungkapan masalah, kemampuan, dan sistem sumber yang ada, berhubungan dengan relasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengungkapan dan pemahaman masalah klien, dilakukan dalam bentuk kegiatan wawancara dan observasi terhadap klien maupun system sumber setiap klien.
- b. Assesmen psikologis (penelusuran minat dan potensi intelegensi/PMPI), adalah proses pengungkapan minat, potensi sikap kerja, potensi kemampuan untuk belajar dan potensi intelegensi. Hasil dari asesmen ini digunakan sebagai salah satu acuan untuk kegiatan bimbingan terhadap klien. Setiap klien membutuhkan waktu 1-2 jam.

2. Orientasi

Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat dan sebagainya yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Menurut Cascio dalam Sedarmayanti (2010), orientasi adalah pengakraban dan penyesuaian dengan situasi atau lingkungan. Orientasi bertujuan menentukan bagaimana seseorang berusaha untuk mencapai hasil yang diinginkannya (Ames dan Archer, 1998). Orientasi menjadi konstruk yang menggambarkan bagaimana individu merespon, memberikan reaksi dan menginterpretasikan situasi untuk mencapai suatu prestasi atau kinerja tertentu (Vande Walle, 1999).

Orientasi menjadi penyediaan informasi dasar berkenaan dengan tempat, masyarakat, organisasi, atau program baru bagi seseorang. Informasi dasar ini mencakup fakta-fakta yang ada pada sesuatu yang dianggap baru tersebut. Orientasi pada dasarnya merupakan salah satu komponen proses sosialisasi seseorang, yaitu suatu proses penanaman sikap, standar, nilai, dan pola perilaku yang berlaku dalam tempat, masyarakat, organisasi maupun program kepada seseorang tersebut.

Kegiatan orientasi dilakukan dalam bentuk pengenalan program Shelter Anak Bangsa dan lingkungan Shelter Anak Bangsa. Melalui proses orientasi ini diharapkan klien memiliki rasa percaya diri dan tumbuh rasa kesetiakawanan sosial di antara sesama klien dengan pembina dan pendamping. Serta dapat mengenal kondisi program dan

tata tertib yang ditetapkan Shelter Anak Bangsa sehingga klien termotivasi untuk mengikuti proses pembinaan dan bimbingan yang ada. Bagi calon klien hasil razia yang tidak mengikuti dari awal proses pembinaan, maka diberikan pembinaan awal (adaptasi, akselerasi bimbingan) terlebih dahulu oleh pembina khusus sebelum mengikuti proses pembinaan lebih lanjut selama 1 (satu) hari.

3. Intervensi

Secara umum, arti intervensi adalah suatu upaya mencampuri, mempengaruhi, bahkan mengendalikan pihak lain dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu terhadap pihak yang diintervensi. Istilah “intervensi” cukup sering digunakan pada berbagai bidang, misalnya kesehatan, pemerintahan, politik, keperawatan, pendidikan, psikologi, dan lainnya.

Intervensi dapat diartikan sebagai sebagai cara atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, komunitas). Intervensi menjadi metode yang digunakan dalam praktik di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial adalah dua bidang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya.

Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas. Dikatakan perubahan terencana agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya. Intervensi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan, dalam hal ini, individu, keluarga, dan kelompok. Keberfungsian sosial menunjuk pada kondisi di mana seseorang dapat berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya.

Tahapan ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada klien selama mereka berada di dalam Shelter Anak Bangsa guna memenuhi kebutuhan fisiologis klien. Selain juga untuk pembentukan dan perubahan perilaku mental, sosial dan fisik klien agar memiliki sikap dan perilaku adaptif dan normative. Kegiatan ini terdiri dari:

- a. Bimbingan mental, terutama yang meliputi bidang mental spiritual, budi pekerti, baik secara individual maupun sosial/kelompok, dan penyampaian motivasi diri untuk membentuk pembiasaan perilaku dan kepribadian sesuai dengan nilai, norma, dan peraturan yang

berlaku. Kegiatan bidang mental spiritual dilakukan secara rutin setiap hari yang meliputi:

- 1) Pembiasaan kegiatan ibadah harian (sholat lima waktu dan sholat sunnah)
- 2) Pembiasaan kegiatan pelajaran agama (aqidah akhlak, ibadah, tarikh, Qur'an hadis)

Sedangkan penyampaian motivasi dilakukan oleh pembina maupun pendamping dalam bentuk penanaman mental disiplin dan contoh nyata (*modelling*), seperti:

- 1) Pengisian absensi kelas
- 2) Penerapan tata tertib dengan pengawasan pendamping
- 3) Pembiasaan latihan baris berbaris
- 4) Pembiasaan kebersihan diri dan lingkungan
- 5) Pembiasaan bercocok tanam dan pemeliharaan ikan.

b. Bimbingan jasmani, dimaksudkan untuk meningkatkan dan memelihara perkembangan fisik klien melalui kegiatan dalam bentuk:

- 1) Senam kesegaran jasmani
- 2) Kerja bakti
- 3) Olahraga prestasi (Volly ball, futsal, tenis meja, catur)
- 4) Apel kebersihan diri setiap hari jum'at
- 5) Pemeriksaan kesehatan

c. Bimbingan sosial, diarahkan untuk membangun komunikasi dan berhubungan dengan orang lain melalui kegiatan:

- 1) Bimbingan hidup bermasyarakat
- 2) Kunjungan keluarga (*home visit*)

d. Bimbingan minat, diarahkan pada peningkatan kemampuan diri dan pengembangan bakat yang dapat diterapkan untuk kemandirian klien. Tujuannya agar diperoleh kecakapan dan keterampilan yang produktif sehingga dapat menjadi bekal dalam menempuh kehidupan dan tidak tergantung pada orang lain. Bimbingan ini meliputi:

- 1) Pelatihan *handycraft*
- 2) Pembinaan seni musik
- 3) Pelatihan bela diri
- 4) Pelatihan kewirausahaan
- 5) Mengikutsertakan dalam pelatihan keterampilan yang diselenggarakan dinas sosial dan/ atau instansi terkait.

- e. Bimbingan kognitif, terutama diarahkan pada peningkatan aspek pengetahuan dan daya pikir guna bekal ilmu dalam mengatasi tugas-tugas kehidupannya. Bentuk kegiatan bimbingan ini adalah:
- 1) Peningkatan kemampuan baca tulis hitung (calistung)
 - 2) Pendampingan belajar yang dilaksanakan oleh pendamping klien setelah kegiatan pelajaran selesai
 - 3) Akselerasi kegiatan program belajar kesetaraan menjelang ujian kejar paket bekerjasama dengan instansi terkait
 - 4) Kunjungan ke perpustakaan Shelter Anak Bangsa.

4. Evaluasi

Stufflebeam, dkk (1971) Mendefinisikan evaluasi sebagai “*The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*”, dalam evaluasi ada beberapa unsur yaitu sebuah proses (process) perolehan (*obtaining*), penggambaran (*delineating*), penyediaan (*providing*) informasi yang berguna (*useful information*) dan alternatif keputusan.

Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab XVI Pasal 57 menyatidakan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Evaluasi menjadi unsur yang cukup penting dalam proses pertolongan karena kemungkinan pekerja sosial maupun badan sosial memberi respon dan pertanggung jawaban, baik kepada pemberi dana maupun kepada penerima pelayanan (sponsor atau klien). Dengan evaluasi pekerja sosial juga mampu menguji keampuhan dan ketepatan alternatif intervensi yang diterapkannya. Di samping itu pekerja sosial juga dapat memonitor faktor-faktor yang membawa keberhasilan dan yang mengakibatkan kegagalan. Pada iklim semacam itu pekerja sosial dan klien dapat melihat akibat-akibat yang telah mereka kerjakan dalam mencapai tujuan akhir.

Tujuan evaluasi sendiri adalah untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pelayanan sosial terhadap klien, guna membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja program/kegiatan pelayanan sosial berbasis Shelter Anak Bangsa di masa mendatang. Sedangkan untuk kebutuhan klien, evaluasi merupakan upaya

untuk melihat seberapa pengaruh tindakan intervensi yang telah diberikan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi klien. Evaluasi ini menyangkut:

- a. Perkembangan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh klien selama mengikuti kegiatan pembinaan
- b. Kondisi psikologis klien sebagai dampak dari proses pengakhiran (terminasi) kegiatan pembinaan
- c. Rencana kegiatan (*action planning*) yang akan dilaksanakan oleh klien sesudah pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya.

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi terhadap klien, akan dihasilkan/diperoleh: Klien dinyatakan telah selesai dan berhasil mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik untuk kemudian dikembalikan kepada orang tua/keluarga guna memperoleh bimbingan lebih lanjut. Selanjutnya untuk membantu klien merealisasikan program kegiatan yang direncanakan, maka Shelter Anak Bangsa memberikan fasilitas atau akses untuk:

- a. Melanjutkan sekolah sesuai jenjang pendidikan yang ditempuhnya
- b. Klien diikutsertakan dalam pembinaan atau pelatihan keterampilan lebih lanjut yang sesuai bakat dan minatnya bekerja sama dengan instansi terkait.
- c. Mengikuti pembinaan di Shelter Anak Bangsa hingga dinyatakan bisa hidup mandiri dan berperilaku normatif di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua desain, yaitu penelitian analisis isi (*content analysis*) dan penelitian pengembangan. Desain analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diinterpretasi.

Desain analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodean data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis tinggi. Penelitian *content analysis* (analisis isi) digunakan untuk menganalisis isi dari landasan hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah digunakan sebagai pedoman untuk pemberdayaan anak jalanan. Hasil analisis ini dipergunakan untuk merumuskan pola kebijakan untuk mengembangkan model. Penelitian pengembangan digunakan untuk mengembangkan model yang terdiri dari: (1) konsep pemberdayaan masyarakat yang melibatkan stakeholder dan perannya; (2) buku sebagai pedoman pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian.

Penelitian pengembangan ini menggunakan Model pengembangan perangkat *Four-D Model* disarankan oleh Sivasailam Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel (1974). Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu *Define, Design, Develop*, dan *Disseminate* atau diadaptasikan

menjadi model 4-D, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran.

Tahap I: *Define* (Pendefinisian)

Tahap *define* adalah tahap untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Tahap *define* ini mencakup lima langkah pokok, yaitu analisis ujung depan (*front-end analysis*), analisis siswa (*learner analysis*), analisis tugas (*task analysis*), analisis konsep (*concept analysis*) dan perumusan tujuan pembelajaran (*specifying instructional objectives*).

1. Analisis Ujung Depan (*front-end analysis*)

Menurut Thiagarajan, dkk (1974), analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga diperlukan suatu pengembangan, dalam konteks ini adalah pengembangan Model Pembelajaran.

2. Analisis Siswa (*learner analysis*)

Menurut Thiagarajan, dkk (1974), analisis siswa merupakan telaah tentang karakteristik siswa yang sesuai dengan desain pengembangan model pembelajaran. Karakteristik itu meliputi latar belakang kemampuan akademik (pengetahuan), perkembangan kognitif, serta keterampilan-keterampilan individu atau sosial berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format dan bahasa yang dipilih. Analisis siswa dilakukan untuk mendapatkan gambaran karakteristik siswa, antara lain: (1) tingkat kemampuan atau perkembangan intelektualnya, (2) keterampilan-keterampilan individu atau sosial yang sudah dimiliki dan dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

3. Analisis konsep (*concept analysis*)

Analisis konsep menurut Thiagarajan, dkk (1974) dilakukan untuk mengidentifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menyusunnya dalam bentuk hirarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal kritis dan tidak relevan. Mendukung analisis konsep ini, analisis-analisis yang perlu dilakukan adalah (1) analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis bahan ajar, (2) analisis sumber belajar, yakni mengumpulkan dan mengidentifikasi sumber-sumber mana yang mendukung penyusunan bahan ajar.

4. Analisis Tugas (*task analysis*)

Analisis tugas menurut Thiagarajan, dkk (1974) bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama yang akan dikaji oleh peneliti dan menganalisisnya kedalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan.

5. Perumusan Tujuan Pembelajaran (*specifying instructional objectives*)

Perumusan tujuan pembelajaran menurut Thiagarajan, dkk (1974) berguna untuk merangkum hasil dari analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Kumpulan objek tersebut menjadi dasar untuk menyusun tes dan merancang model pembelajaran yang kemudian diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti.

Tahap II: *Design* (Perancangan)

Tahap perancangan bertujuan untuk merancang model pembelajaran. Empat langkah yang harus dilakukan pada tahap ini, yaitu: (1) penyusunan standar tes (*criterion-test construction*), (2) pemilihan media (*media selection*) yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran, (3) pemilihan format (*format selection*), yakni mengkaji format-format bahan ajar yang ada dan menetapkan format bahan ajar yang akan dikembangkan, (4) membuat rancangan awal (*initial design*) sesuai format yang dipilih. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan tes Acuan Patokan (*constructing criterion-referenced test*)

Menurut Thiagarajan, dkk (1974), penyusunan tes acuan patokan merupakan langkah yang menghubungkan antara tahap pendefinisian (*define*) dengan tahap perancangan (*design*). Tes acuan patokan disusun berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis siswa, kemudian selanjutnya disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes yang dikembangkan disesuaikan dengan jenjang kemampuan kognitif. Penskoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat kunci dan pedoman penskoran setiap butir soal.

2. Pemilihan media (*media selection*)

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Lebih dari itu, media dipilih untuk menyesuaikan dengan analisis konsep dan analisis tugas, karakteristik target pengguna, serta rencana penyebaran dengan atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda, untuk membantu pengguna dalam pencapaian standar yang telah ditetapkan. Artinya, pemilihan media dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan model kebijakan dalam proses pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan di Surabaya Jawa Timur.

3. Pemilihan format (*format selection*)

Pemilihan format dalam pengembangan model pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber

belajar. Format yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria menarik, memudahkan dan membantu dalam pembelajaran.

4. Rancangan awal (*initial design*)

Menurut Thiagarajan, dkk (1974:7) "*initial design is the presenting of the essential instruction through appropriate media and in a suitable sequence.*" Rancangan awal yang dimaksud adalah rancangan seluruh model kebijakan yang harus dikerjakan sebelum ujicoba dilaksanakan. Hal ini juga meliputi berbagai aktivitas kegiatan yang terstruktur dari program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan di Surabaya Jawa Timur.

Tahap III: *Develop* (Pengembangan)

Tahap pengembangan adalah tahap untuk menghasilkan produk pengembangan yang dilakukan melalui dua langkah, yakni: (1) penilaian ahli (*expert appraisal*) yang diikuti dengan revisi, (2) uji coba pengembangan (*developmental testing*). Tujuan tahap pengembangan ini adalah untuk menghasilkan bentuk akhir model pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan masukan para pakar ahli/praktisi dan data hasil ujicoba. Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Validasi ahli/praktisi (*expert appraisal*)

Menurut Thiagarajan, dkk (1974: 8), "*expert appraisal is a technique for obtaining suggestions for the improvement of the material.*" Penilaian para ahli/praktisi terhadap model kebijakan mencakup: format, bahasa, ilustrasi dan isi. Berdasarkan masukan dari para ahli, materi pembelajaran direvisi untuk membuatnya lebih tepat, efektif, mudah digunakan, dan memiliki kualitas teknik yang tinggi.

2. Uji coba pengembangan (*developmental testing*)

Ujicoba lapangan dilakukan untuk memperoleh masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar siswa, dan para pengamat terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun. Menurut Thiagarajan, dkk (1974) ujicoba, revisi dan ujicoba kembali terus dilakukan hingga diperoleh model kebijakan yang konsisten dan efektif.

Tahap IV: *Disseminate* (Penyebaran)

Proses diseminasi merupakan suatu tahap akhir pengembangan. Tahap diseminasi dilakukan untuk mempromosikan produk pengembangan agar bisa diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau sistem. Produsen dan distributor harus selektif dan bekerja sama untuk mengemas materi dalam bentuk yang tepat. Menurut Thiagarajan dkk, (1974: 9), "*the terminal stages of*

final packaging, diffusion, and adoption are most important although most frequently overlooked."

Diseminasi dilakukan melalui sebuah proses penularan kepada para stakeholder pemberdayaan anak jalanan dalam suatu forum tertentu. Bentuk diseminasi ini dengan tujuan untuk mendapatkan masukan, koreksi, saran, penilaian, untuk menyempurnakan produk akhir pengembangan agar siap diadopsi oleh para pengguna produk. Beberapa hal yang akan diperhatikan dalam melakukan diseminasi adalah: (1) analisis pengguna, (2) menentukan strategi dan tema, (3) pemilihan waktu, dan (4) pemilihan media.

1. Analisis Pengguna

Analisis pengguna adalah langkah awal dalam tahapan diseminasi untuk mengetahui atau menentukan pengguna produk yang telah dikembangkan. Menurut Thiagarajan, dkk (1974), pengguna produk bisa dalam bentuk individu/perorangan atau kelompok.

2. Penentuan strategi dan tema penyebaran

Strategi penyebaran adalah rancangan untuk pencapaian penerimaan produk oleh calon pengguna produk pengembangan. Guba (Thiagarajan, 1974) memberikan beberapa strategi penyebaran yang dapat digunakan berdasarkan asumsi pengguna diantaranya adalah: (1) strategi nilai, (2) strategi rasional, (3) strategi didaktik, (4) strategi psikologis, (5) strategi ekonomi dan (6) strategi kekuasaan.

3. Waktu

Menurut Thiagarajan, dkk (1974) selain menentukan strategi dan tema, peneliti juga harus merencanakan waktu penyebaran. Penentuan waktu ini sangat penting khususnya bagi pengguna produk dalam menentukan produk akan digunakan atau tidak (menolaknya).

4. Pemilihan media penyebaran

Menurut Thiagarajan, dkk (1974) dalam penyebaran produk, beberapa jenis media dapat digunakan. Media tersebut dapat berbentuk jurnal pendidikan, majalah pendidikan, konferensi, pertemuan, dan perjanjian dalam berbagai jenis serta melalui pengiriman lewat *e-mail*. Untuk kepentingan diseminasi ini, Thiagarajan, dkk (1974: 173) menetapkan kriteria keefektifan diseminasi, yaitu:

- a. Clarity. Information should be clearly stated, with a particular audience in mind.*
- b. Validity. The information should present a true picture.*
- c. Pervasiveness. The information should reach all of the intended audience.*
- d. Impact. The information should evoke the desire response from intended audience.*

- e. Timeliness. The information should be disseminated at the most opportune time.*
- f. Practicality. The information should be presented in the form best suited to the scope of the project, considering such limitations as distance and available resources.*

Untuk kepentingan penelitian, model pengembangan Thiagarajan, dkk (1974) yang ditetapkan di atas perlu disesuaikan dengan rancangan penelitian dalam batasan rasional.

3.2. Variabel

Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel Pertama meliputi: (1) variabel identifikasi model kebijakan yang telah digunakan Shelter Anak Bangsa dalam melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan di Surabaya. Variabel ini berisi peran dari stakeholder yaitu peran dari: (1) Lembaga Pendidikan dan Latihan; (2) Lembaga Kesehatan; (3) Perusahaan sebagai Mitra kerja; (4) Rumah Singgah; (5) Peran Dinas Sosial; (6) Peran Kepolisian; (7) Peran Satpol Polisi Pamong Praja; dan (8) Peran Orang Tua dalam membangun kemandirian.

3.3. Subyek Penelitian

Mengingat penelitian ini tentang Pengembangan Model Kebijakan Program Pemberdayaan Anak Jalanan Untuk Meningkatkan Kemandirian Di Surabaya Jawa Timur, maka yang menjadi subyek penelitian ini adalah personlia Shelter Anak Bangsa, yaitu Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Shelter Anak Bangsa.

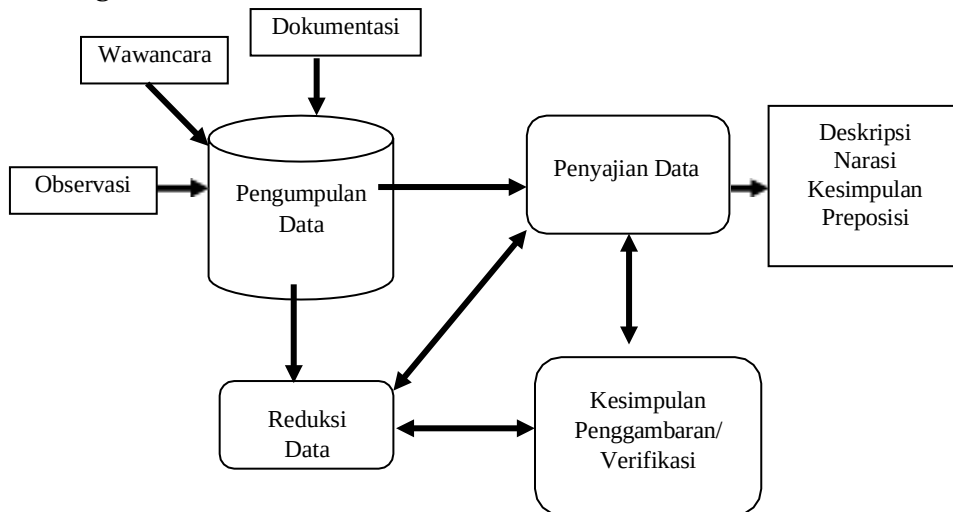
3.4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan wawancara mendalam. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui analisis terhadap dokumen-dokumen yaitu dasar hukum pemberdayaan anak jalanan, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) lembaga, dokumen pendirian lembaga dan program kerja yang dimiliki oleh Shelter Anak Bangsa dan rumah singgah di Surabaya. Teknik pengumpulan data sekunder ini digunakan pedoman kisi-kisi.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan peneliti akan dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Satori dan Komariah, 2013:218-220) yang didasarkan pada tiga komponen yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) atau verifikasi. Analisis data merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus menerus, seperti terlihat pada gambar berikut ini :

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada Miles dan Huberman terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar. 0.1 Komponen Analisis dengan Alur analisis Miles dan Huberman

Gambar di atas, memperlihatkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan terhadap data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuisioner, wawancara dan analisis isi dengan pedoman kisi-kisi.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) Meringkas data; (2) Mengkodefikasi; (3) Menelusur tema; (4) Membuat gugus-gugus. Reduksi data merupakan

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

3. Penyajian data yang dilakukan setelah data direduksi. Peneliti menyajikan data secara deskripsi mengenai model pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan

4. Pengambilan kesimpulan dilakukan sebagai langkah terakhir yang merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan.

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terusmenerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasanpenjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) Memikir ulang selama penulisan; (2) Tinjauan ulang catatan lapangan; (3) Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat; (4) Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain

BAB IV

HASIL PENGEMBANGAN

PRODUK

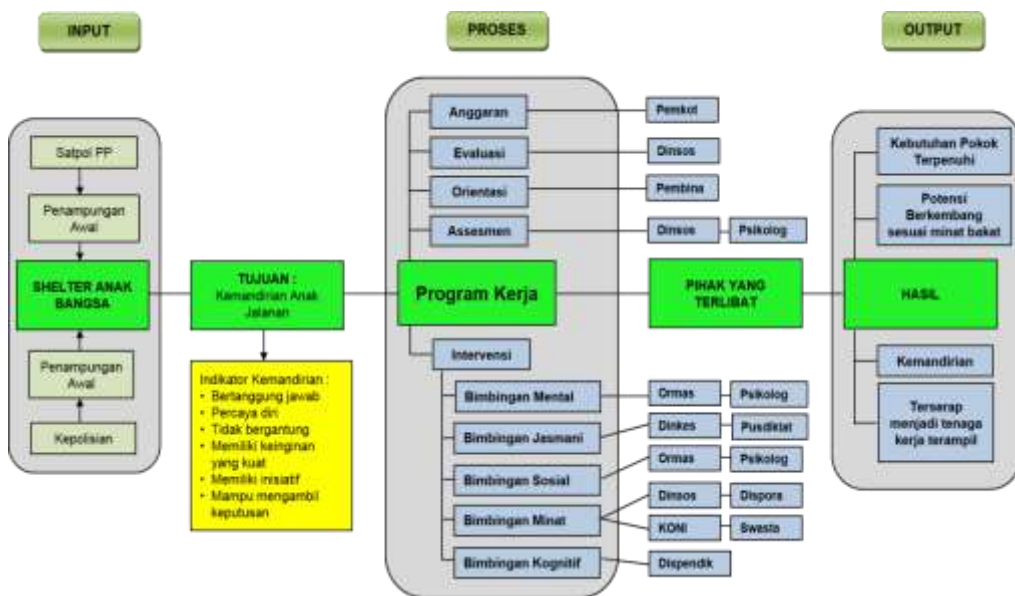
4.1. Identifikasi dan Analisis Model Kebijakan Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Surabaya Jawa Timur

Model kebijakan merupakan abstraksi dari realitas yang dinyatidakan dalam bentuk konsep/teori, diagram atau grafis. Dalam hal ini model kebijakan yang dimaksudkan adalah model kebijakan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan. Identifikasi model yaitu melakukan identifikasi terhadap model-model pemberdayaan yang sudah ada dan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan analisis yaitu melakukan analisis terhadap model kebijakan pemberdayaan anak jalanan tersebut, menjelaskan kelebihan dan kelemahannya.

4.1.1. Identifikasi Model Kebijakan Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Surabaya Jawa Timur

Visi dan misi Shelter Anak Bangsa yang berorientasi kepada pemberdayaan anak jalanan agar dapat berlaku normatif dan mandiri sesuai dengan yang diharapkan masyarakat diterjemahkan dalam program kerjanya. Shelter Anak Bangsa bukan hanya berorientasi pemenuhan kebutuhan pokok anak jalanan saja, akan tetapi juga memiliki program untuk memenuhi hak pendidikan mereka serta bagaimana anak jalanan menjadi mandiri setelah lulus dari Shelter Anak Bangsa. Model pemberdayaan melibatkan seluruh stakeholder untuk mencapai tujuan kemandirian anak jalanan dalam satu sinergi, yaitu melibatkan beberapa SKPD seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, KONI, Satpol PP, TNI dan Kepolisian, Linmas, serta dari elemen lain diluar SKPD seperti ormas, pihak swasta, perguruan tinggi, orang tua anak jalanan bahkan masyarakat.

Berikut yang dipaparkan dalam gambar 0.2. merupakan model pemberdayaan anak jalanan yang telah dilakukan oleh Shelter Anak Bangsa;



Gambar. 0.2 Model Pemberdayaan Anak Jalanan Shelter Anak Bangsa

Pada gambar 0.2. diatas dapat diuraikan bahwa, untuk mencapai kondisi yang sinergi atau demi menghasilkan output yang jauh lebih besar, tidak dapat dihindari bahwa terdapat tingkat kebergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Berikut gambaran sinergisitas UPTD Shelter Anak Bangsa dengan SKPD dan institusi lain dalam mewujudkan visi dan misinya dalam memaksimalkan pemberdayaan untuk kemandirian anak jalanan.

1. Dinas Sosial

Shelter Anak Bangsa memiliki sinergi dengan Dinas Sosial dalam hal pemberdayaan, koordinasi dan pengawasan. Pertama, dalam hal pemberdayaan, Dinas Sosial memiliki peran dalam hal melakukan pendataan dan identifikasi karakteristik anak jalanan sesuai dengan karakter budaya masyarakat Surabaya. Pendataan yang dilakukan harus sesuai dan relevan dengan hasil identifikasi oleh Shelter Anak Bangsa. Fungsi identifikasi dan pendataan ini adalah sebagai langkah awal untuk menentukan beberapa jenis program pemberdayaan, pengembangan pelatihan dan ketrampilan yang tepat bagi anak jalanan sekaligus mekanisme pendanaan yang efisien dan tepat sasaran. Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan anak-anak jalanan untuk kemandirian mereka pasca keluar dari Shelter Anak Bangsa.

Kedua, dalam hal koordinasi, Dinas Sosial memiliki peran sebagai penghubung antara Shelter Anak Bangsa dengan SKPD dan instansi lain, pihak swasta, LSM, orang tua anak jalanan dan masyarakat. Pengoptimalan jejaring kerjasama melalui komunikasi efektif menjadi tanggung jawab dinas social untuk mewujudkan tercapainya pemberdayaan untuk kemandirian anak jalanan. Ketiga, pengawasan Dinas Sosial secara internal dan eksternal penggunaan anggaran dan bantuan berkaitan dengan pemberdayaan anak jalanan seharusnya sinergi dengan seluruh program kerja Shelter Anak Bangsa. Bentuk pengawasan seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya implementasi keterlaksanaan seluruh program kerja, tetapi juga pengawasan pada output dari program pemberdayaan yang telah dilakukan yaitu kemandirian anak jalanan pasca keluar dari Shelter Anak Bangsa, apakah mereka mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan yang diharapkan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pemberdayaan anak jalanan terbagi menjadi tiga yaitu peranan pre-emptif, peran preventif dan penertiban. Pertama, peran pre-emptif Satpol PP yaitu sosialisasi produk hukum, artinya memberikan pengertian kepada mereka bahwa terdapat aturan (Perda) yang mengatur keberadaan komunitas anak jalanan, jika telah dilakukan kegiatan pembinaan tetapi masih melakukan kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, maka kegiatan yang dilakukan adalah tindakan penertiban.

Kedua, peran preventif Satpol PP dalam penertiban anak jalanan adalah melalui pengawasan patrol wilayah yang dilakukan setiap hari atau memanfaatkan anggota guna memantau aktivitas anak jalanan. Ketiga, kegiatan razia atau patrol untuk penertiban anak jalanan dilakukan bekerjasama dengan dinas social dan kepolisian. Kegiatan razia akan dilanjutkan dengan kegiatan identifikasi yang dilakukan di tempat penampungan anak jalanan.

3. TNI dan Kepolisian

Peran Kepolisian dalam pemberdayaan anak jalanan adalah bekerjasama dengan Satpol PP dalam melakukan penertiban anak jalanan. Selain itu Kepolisian memiliki peran untuk membantu Shelter Anak Bangsa dalam menangani anak-anak bermasalah yaitu yang terlibat criminal dan narkoba. Sedangkan TNI memiliki peran sebagai pembina kedisiplinan Shelter Anak Bangsa.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lainnya

a. Dinas Pendidikan

Sasaran utama Pemerintah pada pembinaan anak jalanan adalah untuk memenuhi kebutuhan hak pendidikan. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan dari hasil penertiban mereka di jalan adalah sebagian besar merupakan anak-anak yang putus dan sudah tidak sekolah lagi, oleh karena itu target pembinaan yang dilakukan Shelter Anak Bangsa yaitu memberikan layanan pendidikan dengan cara memfasilitasi mereka untuk bisa mengenyam pendidikan formal. Dalam hal ini Shelter Anak Bangsa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk membantu memasukkan anak-anak jalanan ini pada SD, SMP, SMA/SMK maupun Kejar Paket.

b. Dinas Kesehatan

Dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan anak jalanan, UPTD Shelter Anak Bangsa dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kehidupan anak jalanan yang rentan terhadap permasalahan HIV AIDS akibat perilaku seks bebas maupun obat-obatan terlarang, adapun permasalahan kesehatan lainnya seperti diare, typhus, demam akibat pola hidup yang tidak memikirkan kesehatan. Oleh karena itu melalui Shelter Anak Bangsa bekerja sama dengan dinas Kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan secara layak dalam bentuk Sosialisasi, pemeriksaan kesehatan maupun pelayanan kesehatan secara rutin.

c. Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)

Salah satu program kerja Shelter Anak Bangsa adalah memberikan layanan pembinaan minat dan bakat pada anak-anak jalanan. Program ini diawali dengan penelusuran dan identifikasi minat bakat dengan bantuan dari psikolog. Beberapa anak yang memiliki ketertarikan dalam bidang seni dan khususnya olahraga diberikan pembinaan dengan target agar bisa menjadi anak berprestasi. Dalam hal ini Shelter Anak Bangsa bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pusdiklat untuk meminta bantuan pelatih seperti pelatih balap sepeda, olahraga tinju dan pencak silat. Pelatih yang direkomendasikan untuk melatih anak-anak ini bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal yaitu dengan cara mengikuti kompetisi-kompetisi dan kejuaraan olahraga.

d. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Anak-anak yang memiliki potensi dalam bidang olahraga di Shelter Anak Bangsa yaitu balap sepeda, tinju dan pencak silat, difasilitasi

dengan diberikan pelatih agar semakin berkembang. Potensi tersebut semakin diasah dengan cara diikuti berbagai macam kompetisi dan kejuaraan mulai dari tingkat Kota/Kabupaten, Propinsi bahkan nasional. Oleh karena itu Shelter Anak Bangsa bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia. KONI akan memberikan informasi mengenai berbagai event olahraga dan berbagai jalur yang bisa mengikutsertakan anak-anak yang memiliki potensi bidang olahraga dari Shelter Anak Bangsa.

e. Dinas Kebersihan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Berdasarkan SOP UPTD, anak-anak jalanan yang dibina di Shelter Anak Bangsa sampai dengan mereka berusia 18 tahun. Setelah mereka memasuki usia 18 tahun, maka anak-anak ini bukan lagi menjadi tanggungan UPTD, oleh karena itu Shelter Anak Bangsa memiliki tanggung jawab mendidik dan melakukan program pemberdayaan untuk menyiapkan kemandirian mereka selepas keluar dari Shelter Anak Bangsa. Salah satu cara yang dilakukan untuk masa depan anak-anak ini yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada dinas-dinas lain di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Anak-anak yang memiliki catatan prestasi BAIK selama berada di Shelter Anak Bangsa akan di"promosi"kan untuk bisa bekerja di Dinas Kebersihan atau Linmas.

5. Lembaga Informal

a. Sekolah Hotel Surabaya (SHS)

Surabaya Hotel School (SHS) merupakan lembaga pelatihan kerja swasta perhotelan yang berorientasi pada pasar kerja. Tujuan Shelter Anak Bangsa bekerjasama dengan SHS adalah untuk melakukan pembinaan dan pendidikan berbasis life skill, oleh karena itu, Shelter Anak Bangsa berusaha menawarkan anak-anak yang mempunyai ketekunan dan kemauan untuk bekerja secara mandiri dalam bidang perhotelan. SHS Surabaya menawarkan jasa pelatihan secara gratis untuk anak-anak Shelter Anak Bangsa yang siap bekerja. Setelah selesai kursus di SHS, apabila *track record* mereka bagus selama pendidikan, maka mereka akan direkomendasikan untuk bekerja di beberapa hotel di Surabaya.

b. Ormas Keagamaan

Salah satu program kegiatan Shelter Anak Bangsa yaitu memenuhi kebutuhan bimbingan mental spiritual anak-anak jalanan. Program kegiatan ini meliputi bimbingan mental spiritual secara rutin dan berkesinambungan dengan diikuti kegiatan ibadah harian seperti sholat

berjamaah, mengaji dan tausiah. Diperlukan seorang pembimbing dalam kegiatan ini, oleh karena itu Shelter Anak Bangsa meminta bantuan ustadz sebagai pembimbing kepada salah satu organisasi keagamaan (PP Muhammadiyah) yang akan membantu mengawal ibadah anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya.

c. Lembaga Psikolog

Shelter Anak Bangsa memiliki program memenuhi kebutuhan bimbingan mental perilaku anak-anak jalanan. Kegiatan ini meliputi kegiatan pembinaan yang berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku yang normative dalam bentuk bimbingan konseling, curah pendapat, role playing ataupun kegiatan outdoor. Dalam hal ini Shelter Anak Bangsa meminta bantuan psikolog yang direkomendasikan oleh Pemerintah Kota.

d. Komunitas Seni Surabaya

Pengembangan potensi anak jalanan di Shelter Anak Bangsa bukan hanya dalam bidang olahraga, tetapi juga dalam bidang seni. Dalam bidang seni ini beberapa keterampilan yang dikembangkan yaitu seni musik dan seni lukis. Dalam mengembangkan keterampilan seni anak-anak ini, Shelter Anak Bangsa bekerjasama dengan Komunitas Seni di Surabaya sebagai Pembina dan pelatih anak-anak. Target pembinaan dalam bidang ini adalah aktualisasi diri anak-anak dan pengembangan prestasi mereka.

4.1.2. Analisis Model Kebijakan Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Surabaya Jawa Timur

Secara epistemologi pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan atau kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kebebasan mengemukakan pendapat, bebas dari kebodohan, mampu menjangkau sumber-sumber produktif dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan anak jalanan berarti upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dirinya agar menjadi lebih berkembang serta dapat menghadapi kehidupan yang lebih modern. Dengan begitu pemberdayaan anak jalanan adalah memberikan kuasa kepada anak jalanan agar dapat mengoptimalkan daya yang dimiliki dalam dirinya

sehingga dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Mengkritisi model pemberdayaan anak jalanan yang telah dilakukan oleh Shelter Anak Bangsa (gambar 0.2), model yang ada sebenarnya sudah cukup menggambarkan adanya sinergi antar SKPD (Pemerintah) dengan pihak swasta dan ormas (non Pemerintah) dalam proses pemberdayaan untuk kemandirian anak jalanan, akan tetapi dalam model tersebut terdapat beberapa kelemahan yakni :

1. Dalam proses pemberdayaan, beberapa pihak yang terlibat masih didominasi oleh SKPD (Pemerintah), sedangkan dari non pemerintah masih sebatas relawan dari ormas dan lembaga psikolog yang dilibatkan.

Kepala Shelter Anak Bangsa mengatidakan :

“...kalau berbicara masalah kerjasama dalam mendampingi anak-anak, Shelter Anak Bangsa lebih banyak bekerjasama dengan instansi Pemerintah, seperti Dinsos, Dinkes, Dispendik, Satpol PP, Kepolisian dan Marinir. Masing-masing memiliki peran yang sesuai dengan program kerja yang dibuat. Selain itu, ada beberapa yang membantu untuk mendampingi anak-anak selain pengurus. Ada Pak Ustadz, itu dari PP Muhammadiyah Surabaya, yang biasanya membantu dalam bidang bimbingan mental spiritual, untuk mendampingi pembiasaan kegiatan ibadah dan pelajaran agama seperti ceramah. Selain itu disini juga ada psikolog yang mendampingi anak-anak bermasalah, kesulitan belajar, berkasus di sekolah seperti bolos atau bertengkar serta mengidentifikasi minat bakat dan prestasi anak-anak. Ada juga yang bagian melatih bidang minat bakat anak-anak di olahraga dan seni. Itu kita bekerjasamanya dengan KONI untuk minta pelatih. Kadang beberapa lembaga kursus dan dari perguruan tinggi juga datang kesini, memberikan pelatihan keterampilan sehari atau sekedar bakti sosial, belum ada kerjasama dengan mereka yang terprogram dan berlanjut, meskipun sebenarnya peluangnya besar untuk meningkatkan kemandirian anak-anak..”

2. Belum ada mekanisme control yang melibatkan orang tua dan masyarakat pasca anak jalanan kembali ke kehidupan normal (lulus dari shelter anak bangsa)

“...Berdasarkan SOP Shelter Anak Bangsa, anak-anak jalanan yang ditampung disini adalah sampai batas usia 18 tahun. Setelah itu mereka akan diwisuda dan dikembalikan ke orang tua/keluarga masing-masing. Artinya Shelter Anak Bangsa sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi terhadap kehidupan mereka pasca lulus dari sini..”

Pertanyaan : ada tidak kemungkinan mereka kembali ke kehidupan jalanan/terlibat kriminal setelah lulus dari sini?

“...Disini setelah mereka lulus kami sudah tidak berhubungan lagi, kecuali yang sudah bekerja atas rekomendasi dari sini seperti kerja di lingkungan Pemkot, atau

di hotel tempat mereka magang sebelumnya. biasanya masih berhubungan, kadang datang untuk sekedar memberi motivasi ke adik-adiknya. Nah, untuk yang lulus dan kembali ke keluarga, kami sudah tidak dapat info lagi karena kita juga sdh tdk memiliki tanggung jawab terhadap mereka. Artinya kami tidak memiliki jalur untuk memantau mereka setelah lulus, baik melalui orang tua, keluarga atau lainnya ...”.

3. Dalam model, hasil hanya memprioritaskan kemandirian dalam hal pekerjaan saja, belum difikirkan jalur beasiswa bagi anak yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi

Pertanyaan : dari sekian anak yang lulus, apakah semua langsung bekerja? Atau adakah yang melanjutkan ke perguruan tinggi?

“...Anak-anak binaan kami di Shelter Anak Bangsa yang baik, rajin, sopan dan nurut biasanya akan kami rekomendasikan ke Pemkot untuk bekerja. Biasanya mereka akan siap asalkan tidak gengsi, karena biasanya yang menerima itu kan dinas kebersihan dan satpol PP, atau di SHS hotel tempat magang. Dari semua lulusan ada sekitar 40 persen yang kami rekomendasikan. Kalau kuliah, ada beberapa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi sesuai dengan SOP kan mereka hanya smp umur 18 tahun disini, jadi bukan tanggungan kami lagi. Akan tetapi Pemkot punya program beasiswa sosial ke perguruan tinggi kalau misalnya jalur itu mau diambil, tetapi kami belum pernah memfasilitasi, disamping kami tidak ada kerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal ini..”.

4. Pada permasalahan anggaran, Shelter Anak Bangsa masih bergantung pada Pemerintah Kota, belum disiapkan alternative lain untuk membiayai program kerja/kegiatan yang sudah direncanakan.

“...Anggaran UPTD Kampung Anak Negri sepenuhnya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Surabaya. Dari dana DIPA yang disalurkan kami sudah memiliki pos-pos untuk pembiayaan kebutuhan pokok anak-anak, biaya pembinaan minat dan bakat serta pemeliharaan kegiatan kantor. Jadi harus pandai-pandai mengatur dan menyusun rencana anggaran dan kegiatan. Seandainya ada kegiatan yang tidak kita anggarkan sebelumnya, misalnya lomba untuk anak-anak yaaaa... terpaksa kita tidak mengikuti lomba itu. Kami belum punya semacam donatur yang siap membantu pembiayaan kegiatan yang tidak tercover anggaran DIPA...”.

Memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengembangkan model pemberdayaan anak jalanan dengan menggunakan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh stakeholder agar tercapai sinergitas untuk mencapai tujuan bersama yaitu

kemandirian anak jalanan. Shelter Anak Bangsa sebagai pusat pemberdayaan sudah seharusnya bekerjasama dan melibatkan SKPD lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kota untuk mencapai visi dan misinya. Selain itu Shelter Anak Bangsa juga sebaiknya berkolaborasi dengan pihak swasta, bekerjasama dengan orang tua anak jalanan bahkan harus melibatkan masyarakat dalam mekanisme control dan pengawasannya.

4.2. Pengembangan Model Kebijakan Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Surabaya Jawa Timur

Pengembangan model kebijakan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan di Surabaya berisi tentang bagaimana mengembangkan model kebijakan pemberdayaan yang komprehensif dan sinergis antar *stakeholder*. Bersumber dari model pemberdayaan yang telah ada kemudian dikembangkan dalam konsep model pemberdayaan yang mensinergikan antar *stakeholder*, bagaimana langkah-langkah pengembangannya dan bagaimana model kebijakan tersebut digambarkan dalam sebuah bagan.

4.2.1. Konsep Model Pemberdayaan yang digunakan untuk Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Surabaya Jawa Timur

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi suatu program diantaranya adalah mengenai bagaimana hubungan kerjasama yang terjalin diantara para pihak yang berhubungan di dalamnya. Pelaksanaan suatu kebijakan/program pemerintah selalu berkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya, dalam kata lain tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga, agar suatu program dapat berjalan dengan baik, peran dan fungsi yang dimiliki masing-masing bidang harus saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Stephen R. Covey (2004) menjelaskan bahwa sinergi (Synergy) merupakan kegiatan saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Sinergi merupakan suatu kerjasama yang dapat terwujud ketika kita bisa mensinkronkan bermacam alternatif keinginan antara anggota tim. Sinergi sebagai kemampuan dalam mewujudkan hasil menakjubkan seperti hal-hal atau alternatif baru yang dahulunya tidak ada.

Pemberdayaan anak jalanan berarti upaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dirinya agar menjadi lebih berkembang serta dapat menghadapi kehidupan yang lebih modern. Dengan begitu pemberdayaan anak jalanan adalah memberikan kuasa kepada anak jalanan agar dapat mengoptimalkan daya yang dimiliki dalam dirinya sehingga dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Model pemberdayaan anak jalanan yang dikembangkan ini menggunakan

pendekatan komprehensif, yaitu pendekatan secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan dari berbagai aspek yang saling menyatu. Model pemberdayaan melibatkan seluruh stakeholder dari Pemerintah (SKPD), pihak swasta dan masyarakat.

1. Pemerintah

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban memelihara anak terlantar. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah memiliki dua fungsi yaitu primer dan sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi pelayanan (*service*) sebagai jasa publik yang memberikan layanan maksimal kepada masyarakat, dalam hal ini adalah anak jalanan. Selanjutnya yaitu fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Pemerintah sebagai motor penggerak utama pemberdayaan memiliki tanggung jawab untuk mensinergikan koordinasi dan kerjasama antar SKPD untuk mencapai tujuan kemandirian anak jalanan.

UPTD Shelter Anak Bangsa sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam bidang pemberdayaan anak jalanan memiliki visi, misi dan program kerja yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan menyiapkan kemandirian mereka pasca keluar dari Shelter Anak Bangsa. Hasil yang dicapai oleh Shelter Anak Bangsa akan menjadi maksimal apabila didukung oleh SKPD-SKPD lainnya. Berikut beberapa SKPD yang bisa dilibatkan dalam model pemberdayaan : (a) Dinas Sosial; (b) Dinas Pendidikan; (c) Dinas Kesehatan; (d) Dinas Kepemudaan dan Olahraga; (e) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; (f) Satpol Pamong Praja, dan; (g) TNI/Polri.

2. Pihak Swasta

Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-daerah otonom baru tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Non Governmental Organisation (NGO), serta dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah melaksanakan aktivitas pemberdayaan oleh

pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan skill SDM dan finansial sehingga perlu keterlibatan pihak swasta.

Swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta, antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non-pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau pribadi. Beberapa bagian yang bisa ditawarkan atau diisi oleh pihak swasta dalam model pemberdayaan yaitu : (a) Pendanaan; (b) Program Pendidikan Kewirausahaan; (c) Program CSR untuk kegiatan pelatihan; (d) Program Magang; (e) Pendidikan Vokasional.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat sebagai organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara, dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba), dan kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi

Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah yang ada dapat di kategorikan sebagai berikut:

- a.** Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
- b.** Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
- c.** Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dan lain-lain.
- d.** Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah

Dalam hal pemberdayaan anak jalanan, pihak LSM ini dapat memberikan kontribusi dalam beberapa hal yaitu : (a) Bimbingan keterampilan personal dan social; (b) Bimbingan karir; (c) Pendidikan kewirausahaan, dan; (d) Pembinaan Minat dan Bakat.

4. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal. Biasanya disampaikan dalam bentuk universitas, akademi, colleges, seminari, sekolah musik, dan institut teknologi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen. Berdasarkan kepemilikannya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu: perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi bisa mengambil peran dalam hal koordinasi dan kerjasama yaitu: (a) Program Studi Lanjutan; (b) Pendidikan kewirausahaan; dan (c) *Academic Skills*.

5. Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) (kadang disebut *Gesellschaft* atau patembayan) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional. Masyarakat dalam model pemberdayaan ini yaitu orang tua anak jalanan dan masyarakat secara umum. Peran yang bisa diambil dalam model yaitu : (a) Pengawasan, dan; (b) Keterampilan Personal dan Sosial.

4.2.2. Langkah-Langkah Pengembangan Model Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Surabaya Jawa Timur

Pengembangan model pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan di Surabaya mengambil UPTD Shelter Anak Bangsa sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan. Model pemberdayaan ini dikembangkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1.** Melakukan Identifikasi model pemberdayaan anak jalanan yang telah dilaksanakan oleh UPTD Shelter Anak Bangsa sebagai lembaga yang menginduk pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Model tersebut telah digambarkan pada halaman sebelumnya dimana telah melibatkan beberapa SKPD namun belum terpolakan dengan baik.
- 2.** Melakukan analisis terhadap model pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan di Shelter Anak Bangsa. Apakah program kegiatan dan pola pembinaan telah efektif untuk menumbuhkan kemandirian anak jalanan yang tinggal disana, apa kelebihan dan kelemahan model pemberdayaan yang telah dilakukan.
- 3.** Melakukan pemetaan terhadap hasil analisis model, guna untuk perancangan model pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan
- 4.** Pengembangan model pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian anak jalanan di Surabaya. Model pemberdayaan ini menggabungkan model *community* dan model *institution*. Secara komprehensif model pemberdayaan ini juga mengkolaborasikan Shelter Anak Bangsa dan beberapa SKPD (Pemerintah), dengan stakeholder yaitu LSM, Perguruan Tinggi, Pihak Swa

4.2.3. Pengembangan Model Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Surabaya Jawa Timur

Terdapat beberapa model pengembangan anak jalanan, namun dalam buku ini akan dijelaskan model pengembangan yang berpangkal dari kelemahan model yang ada (gambar .0.2). Pengembangan pemberdayaan anak jalanan ini menggunakan dua model. **Pertama, model *institutional-centered intervention***, yaitu penanganan anak jalanan dengan memusatkan mereka dalam sebuah lembaga/panti (dalam hal ini adalah Shelter Anak Bangsa). Anak jalanan yang terkena razia akan dikumpulkan terlebih dahulu pada tempat penampungan di Keputih Surabaya (*drop in center*), untuk kemudian dipilih yang memiliki identitas Surabaya akan ditempatkan di Shelter Anak Bangsa (*residential center*). Dalam lembaga ini mereka diberikan pelayanan, perlindungan dan perlakuan yang baik.

Pemberdayaan anak jalanan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga dapat mencapai kemandirian. Pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. Tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu menjadi mandiri, meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Untuk mencapai kemandirian diperlukan sebuah proses belajar secara bertahap. Shelter Anak Bangsa sebagai salah satu SKPD yang diberi amanah untuk mempersiapkan kemandirian anak jalanan dalam konsep pemberdayaan yang dilakukan, salah satunya yaitu dengan memberikan pendidikan keterampilan/kecakapan hidup (*life skills*).

1. Kecakapan Personal (*Personal Skill*)

a. Kecakapan Kesadaran Diri (*Self Awareness*)

Kesadaran diri merupakan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Kecakapan kesadaran diri merupakan upaya sadar untuk menumbuhkan kesadaran diri. Untuk memahami diri sendiri idealnya dengan mengenal diri sendiri. Beberapa hal yang harus dikenali dalam diri yaitu mengenal potensi diri melalui minat bakat, hobby, cita-cita, mengenali peran diri, mengenal kelebihan dan kekurangan diri yaitu unsure jasmani dan unsure rohani.

Konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya, yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya. Adapun konsep diri, diantaranya adalah konsep diri positif dan konsep diri negative. Konsep diri merupakan faktor penting dalam berinteraksi. Kemampuan menyadari siapa dirinya, mengamati diri dalam setiap tindakan serta mampu mengevaluasi setiap tindakan sehingga mengerti dan memahami tingkah laku yang dapat diterima oleh lingkungan. Dengan demikian, manusia memiliki kecenderungan untuk memegang

nilai-nilai. Tingkah laku individu sangat bergantung pada kualitas konsep dirinya.

Beberapa aspek penting yang perlu dikenali dalam kecakapan kesadaran diri yaitu mengenali peran-peran diri, mengenali potensi diri melalui minat, bakat, hobby, cita-cita, mengenali pikiran sendiri, mengenali jasmani, mengenali rohani, mengenali waktu diri, mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Dalam mengenali peran diri sendiri, ada beberapa peran diri yang harus dikenali yaitu peran sebagai abdi Allah/hamba ciptaan Allah, peran sebagai anak, peran sebagai orang tua (kunci ketahanan keluarga), peran sebagai khalifah (pemegang profesi/pencari nafkah) dan peran sebagai warga negara. Jika peran ini sudah dikenal, maka akan lebih mudah menjaga diri dalam peran yang dijalani.

b. Kecakapan Berfikir Rasional (*Thinking Skills*)

Kecakapan berpikir (*thinking skill*) meliputi kecakapan menggali informasi, kecakapan mengolah informasi, kecakapan mengambil keputusan, dan kecakapan memecahkan masalah. Kecakapan menggali informasi adalah kecakapan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Kecakapan mengolah informasi adalah kecakapan menyaring, menyeleksi, dan menyimpan informasi. Kecakapan mengambil keputusan ialah kecakapan memanfaatkan informasi untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu sesuai dengan keperluannya. Sedangkan kecakapan memecahkan masalah adalah kecakapan dalam memecahkan problema hidup dan kehidupan dengan menggunakan informasi dan keputusan yang telah ada. Dengan kecakapan berpikir rasional ini (*thinking skill*), diharapkan seseorang tidak akan gamang menghadapi kehidupan, sehingga dia dapat menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan.

Dalam menanamkan kecakapan personal kepada anak jalanan diperlukan sinergitas antara Shelter Anak Bangsa, Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta. Beberapa pihak yang perlu dilibatkan dalam hal ini yaitu dinas social, lembaga psikolog, rumah singgah.

2. Kecakapan Sosial (*Social Skills*)

a. Kecakapan Komunikasi (*Communication Skills*)

Kecakapan komunikasi meliputi rasa empati, sikap penuh pengertian, dan seni berkomunikasi dua arah perlu ditekankan, karena berkomunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik yang akan menumbuhkan

hubungan harmonis. Kecakapan komunikasi sangat diperlukan, karena manusia berinteraksi dengan manusia lain melalui komunikasi, baik secara lisan, tertulis, tergambar, maupun melalui kesan. Kecakapan komunikasi terdiri dari dua bagian, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal meliputi kecakapan mendengarkan berbicara, dan membaca-menulis. Komunikasi non-verbal meliputi pemahaman atas mimik, bahasa tubuh, dan tampilan atau peragaan. Dengan demikian, dalam kecakapan komunikasi tercakup kecakapan mendengarkan, berbicara, dan kecakapan menulis pendapat/gagasan.

b. Kecakapan Kerjasama (*Cooperation Skills*)

Kecakapan bekerjasama tercakup kecakapan sebagai teman kerja yang menyenangkan dan sebagai pemimpin yang berempati. Sebagai teman yang menyenangkan, seseorang harus mampu membangun iklim yang kondusif dalam bersosialisasi diantaranya menghargai orang lain secara positif, membangun hubungan dengan orang lain dan sikap terbuka. Dalam kepemimpinan tercakup aspek tanggungjawab, sosialisasi, teguh, berani, mampu mempengaruhi dan mengarahkan orang lain.

3. Kecakapan Akademik (*Academic Skills*)

Kecakapan akademik (*Academic Skill*) adalah kecakapan yang dimiliki seseorang di bidang akademik. Kecakapan akademik sering juga disebut kecakapan berpikir ilmiah yang merupakan kelanjutan dari kecakapan berpikir rasional. Jika kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*) masih bersifat umum, kecakapan akademik sudah mengarah kepada kecakapan yang bersifat keilmuan (akademik). Kecakapan akademik antara lain meliputi kecakapan mengidentifikasi variabel, menghubungkan variabel dengan fenomena tertentu, merumuskan hipotesis, dan merancang serta melakukan penelitian. Hal ini mungkin dapat dilatihkan dalam skala-skala sederhana kepada siswa SD dan MI sehingga tidak terkesan memaksakan.

4. Kecakapan Vokasional (*Vocational Skills*)

Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan atau kegiatan tertentu yang terdapat di masyarakat dan lebih memerlukan keterampilan motorik. Dalam kecakapan vokasional tercakup kecakapan vokasional dasar atau pravokasional yang meliputi kecakapan menggunakan alat kerja, alat ukur, memilih bahan, merancang produk; dan kecakapan vokasional penunjang yang meliputi kecenderungan untuk bertindak dan sikap kewirausahaan.

5. Pendidikan Kewirausahaan (*Entrepreneurship Education*)

Pembelajaran Kewirausahaan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan seseorang dengan lingkungannya.

a. Pelatihan Service HP

Skill atau ketrampilan saat ini telah memegang peranan penting dalam persaingan dalam ekonomi terutama dalam dunia usaha, salah satu ketrampilan yang mudah dikuasai dengan potensi pasar yang besar adalah Ketrampilan *Service Handphone*. Usaha *Service Handphone* menjadi peluang yang bagus karena memang lebih dari separuh rakyat Indonesia sudah memakai *Handphone* atau *smartphone*. Dahulu 7-8 tahun yang lalu *Handphone* masih menjadi kebutuhan sekunder, sekarang sudah menjadi kebutuhan primer hampir kita tidak bisa dipisahkan dengan pemakaian *handphone/smartphone* dalam kehidupan kita saat ini. Banyak pabrikan atau produsen besar yang terus berinovasi agar *handphone/smartphone* semakin dekat dengan manusia

Handphone beberapa tahun terakhir, menjadi teknologi yang sangat membantu dan mempermudah aktivitas dan informasi manusia baik dalam lingkup regional internasional. Akan tetapi tidak sedikit pula yang mengalami kesulitan dalam cara pengoperasian *handphone* maupun cara mengatasi gangguan dan kurangnya. Hal ini membuat seseorang pada akhirnya menyerahkan pada gangguan tersebut untuk diperbaiki oleh ahlinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa *service* garansi resmi hanya 1 tahun sedangkan *user* atau pemakai *handphone* rata-rata memakai *handphone* dalam jangka waktu 2-3 tahun, setelah pemakaian 1 tahun biasanya akan ada perbaikan ringan seperti penggantian *mic*, *speaker*, *buzzer* atau nada dering maupun komponen *user interface touchscreen*, *LCD* dan *Baterai*. Kesalahan pemakaian seperti jatuh terkena air atau kehujanan tidak termasuk dalam Garansi resmi.

Untuk masuk dalam dunia *service Handphone* tentu kita bisa belajar dengan cara kursus singkat atau belajar *service handphone* otodidak tentu harus dipandu dalam tahapan tutorial yang benar agar tidak asal bongkar yang akhirnya malah menyebabkan kerusakan lainnya. Program pelatihan yang diberikan di Shelter Anak Bangsa, untuk melatih keterampilan anak jalanan berupa pelatihan *service Handphone* dalam bentuk program interaktif yang akan membantu para pemula

agar memahami *service handphone* mulai dari mengenal komponen *Handphone* hingga terapan dalam praktek langsung.

b. Pelatihan Perbengkelan

Kebutuhan akan kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu ada peningkatan. Seiring dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor ini, maka perawatan secara rutin harus dilakukan, selain itu apabila terjadi kerusakan harus dilakukan perbaikan atau *service*.

Servis kendaraan bermotor (*Tune Up*) dapat diartikan sebagai pekerjaan pemulihan atau pengkondisian kembali kerja kendaraan sehingga sesuai dengan standar yang telah ditentukan sesuai dengan pedoman (Ibnu Siswanto, 2008). *Tune Up* diperlukan karena setiap kendaraan yang dipergunakan mengalami perubahan kondisi mesin berupa aus komponen, kotoran pada sistem bahan bakar serta kerusakan lain selama dipergunakan oleh pengendara. Untuk mengembalikan kondisi kendaraan sehingga sesuai dengan spesifikasinya dan bekerja optimal maka perlu dilakukan *tune up*. *Tune up* merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara rutin setiap interval waktu maksimal tiga bulan atau jarak yang ditempuh sudah mencapai 2000 km untuk sepeda motor.

Untuk melakukan perawatan dan perbaikan haruslah orang yang ahli dalam hal ini adalah bengkel perbaikan dan perawatan. Sementara saat ini jumlah bengkel yang ada masih belum seimbang dengan jumlah kendaraan yang akan melakukan perawatan dan perbaikan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang ahli dan trampil dalam bidang perawatan dan perbaikan sepeda motor sangat terbatas jumlahnya. Melihat keadaan yang demikian, pelatihan perbengkelan dapat dilakukan untuk anak-anak dengan tujuan agar dapat diaplikasikan dan di praktekan kedepannya. Hal ini tentu menjadi peluang untuk menekuni pekerjaan sebagai ahli kendaraan bermotor dengan mendirikan bengkel.

Pelatihan (*training*) adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu pencapaian tujuan organisasi (Mathis & Jackson, 2002). Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta ketrampilan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan mereka saat ini. Anwar Prabu (2003 : 24) mengemukakan bahwa pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, pegawai non-manajerialnya mempelajari pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam

tujuan terbatas. Secara garis besar pelatihan menyediakan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta ketrampilan yang digunakan dalam melakukan pekerjaan mereka saat ini.

Bengkel sendiri mempunyai arti sebagai tempat yang digunakan untuk merawat dan memperbaiki mesin-mesin, maupun peralatan. Fungsi bengkel adalah sebagai tempat perawatan, perbaikan, dan penggantian komponen sistem sebuah mesin maupun peralatan lainnya. Pelatihan perbengkelan mempunyai arti sebagai suatu proses pengendalian suatu tempat merawat dan memperbaiki mesin ataupun peralatan lain. Bengkel pada umumnya terbagi 2 bagian yaitu secara umum berfungsi sebagai tempat *service*, *repair*, dan *maintenance* atau (Perawatan, Perbaikan, dan Pemeliharaan) yang konotasi artinya dapat dijelaskan sebagai Perbaikan, yaitu mengganti bagian yg aus/rusak agar tidak terjadi kesalahan, Perawatan, yaitu agar kondisi tetap terjaga dan umur pemakaian menjadi awet dan pemeliharaan, yaitu agar dapat berproduksi secara efisien dan mampu berkembang.

c. Mendirikan Café

Sebagai salah satu kebutuhan utama manusia, makanan menawarkan berbagai celah bisnis untuk dilakukan. Bagi mereka yang punya modal sedikit dan kemampuan memasak standart, menjual makanan olahan, seperti nasi goreng, yang ditawarkan secara keliling dengan gerobak bisa jadi ide usaha yang layak dijalankan. Namun tentu, peluang usaha kuliner tidak sebatas bisnis *survival* semacam itu. Saat ini daya beli masyarakat semakin hari semakin meningkat, keinginan menikmati makanan pun semakin beragam.

Ada orang yang bertekad hidup sehat hingga sudi menghitung berapa besar kalori yang ada di tiap makanannya. Kelompok orang semacam ini membuka celah pasar bagi mereka yang ingin berbisnis katering sehat. Bahkan, peluang usaha kuliner bisa juga datang dari kebutuhan untuk mengemil, alias menikmati makanan ringan di saat bercengkerama dengan keluarga atau kerabat. Keadaan inilah yang akhirnya melahirkan tempat-tempat makan semacam Cafe.

Menirikan usaha Cafe bukanlah hal instan dan mudah, tidak hanya modal saja namun perlu banyak persiapan hal-hal lain sebelum sebuah Cafe didirikan. Anak jalanan memiliki peluang untuk mengembangkan *skill*nya di bidang ini. mereka yang memiliki *skill* memasak atau berhubungan dengan hidangan, dapat diarahkan untuk mendirikan sebuah Cafe. Oleh karena perlu sebuah pelatihan manejamn pendirian sebuah usaha sebelum anak-anak tersebut terjun

dan mengaplikasikannya. Mereka akan diajarkan beberapa hal persiapan sebelum Cafe didirikan, seperti:

1) Merancang Konsep

Langkah pertama ini haruslah menjawab tentang apa yang ingin kita tawarkan pada pembeli. Sebuah garis besar tentang keistimewaan Cafe tersebut dibandingkan dengan yang lain. Sebuah konsep yang menggambarkan bentuk, suasana dan nuansa.

2) Jenis Hidangan

Garis besar konsep cafe tentu harus diterjemahkan lebih detail lagi. Dengan memastikan apa saja minuman dan makanan yang akan menjadi unggulan.

3) Pasokan Bahan

Usai menentukan hidangan apa yang akan disajikan selanjutnya mencari, pasokan bahan yang dibutuhkan sesuai daftar menu Cafe.

4) Lokasi

Seperti kebanyakan tempat usaha lain, tentu lokasi yang paling ideal bagi cafe adalah lokasi yang berada dalam pandangan mata dan jangkauan kaki banyak orang. Jika berada di pusat keramaian, seperti mal, tentu lebih baik lagi.

d. Usaha Cuci Motor dan Mobil

Usaha cuci motor dan mobil saat ini tidak bisa lagi dianggap remeh. Banyaknya pengguna motor di Indonesia, menjadikan usaha cuci motor memiliki peluang yang sangat besar. Apalagi, jika usaha cuci motor dan mobil tersebut berada di perkotaan. Seperti biasa, kesibukan adalah salah satu faktor penyebab adanya usaha cuci motor dan mobil. Masyarakat yang sibuk dan enggan mencuci motor atau mobil sendiri akhirnya memasrahkan untuk dicuci di tempat *steam* motor. Bukan cuma itu saja, banyaknya fakta lapangan yang menunjukkan bahwa banyak keluarga yang memiliki lebih dari satu motor. Fakta-fakta yang disebutkan diatas semakin memperkuat adanya ketergantungan masyarakat dengan kendaraan bermotor.

Melihat fakta ini, kita bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan laba dengan membuka usaha cuci motor dan mobil. Besarnya peluang usaha cuci motor dan mobil ditunjang juga dengan padatnya aktivitas masyarakat di perkotaan. Kesibukan mereka ini yang sering kali mengabaikan kebersihan kendaraan yang dimiliki. Sehingga mereka tidak bisa menyisihkan waktu untuk sekedar mencuci sendiri. Disinilah peluang untuk menawarkan solusi praktis bagi mereka yang tidak bisa menyisihkan waktu membersihkan kendaraannya. Usaha cuci motor

bisa menjadi usaha yang sangat menjanjikan. Apalagi jika dijalankan saat musim hujan. Saat musim hujan, biasanya pemilik motor akan lebih sering mencuci motornya. Meski hanya mencuci, usaha ini tidak bisa dianggap remeh. Ditambah lagi, usaha dibidang jasa cenderung memiliki banyak peminat karena sangat dibutuhkan masyarakat dan dianggap mampu memudahkan berbagai aktivitas mereka.

e. Usaha Sinom “KANRI”

Sinom adalah nama lain dari daun asam muda. Di Jawa Timur, khususnya Surabaya dan sekitarnya, sinom menjadi bahan dasar minuman. Sinom menjadi salah satu jamu tradisional favorit masyarakat yang berbahan dasar daun asam. Selain enak, nikmat, menyegarkan, melepas dahaga, juga meyehatkan bagi tubuh manusia. Penjualnya banyak ditemui di pinggir jalan pusat keramaian, tidak terkecuali di Surabaya.

Minuman yang berasal dari daun sinom ini merupakan tanaman asam jawa, dan orang-orang jawa dahulu juga sering menggunakan ini sebagai minuman yang berguna untuk melancarkan peredaran darah. Sejak jaman dahulu minuman ini dikonsumsi sebagai obat, yang bersifat kimiawi alami, memang benar menggagumkan pengetahuan warisan nenek moyang, hal ini sangat kontras dengan jaman sekarang yang meskipun banyak obat untuk mengobati penyakit tetapi masih mengandung efek samping kimiawi, dan membuat tubuh bisa sembuh maksimal. Selain itu Sinom mempunyai kegunaan untuk meningkatkan nafsu makan dan nyeri haid.

Berbentuk kemasan yang makin mudah untuk dikonsumsi. Sinom kemasan merupakan sinom berbentuk bubuk yang dimasukan ke dalam kemasan praktis. Peminat sinom kemasan di negeri ini memang terbilang tinggi. Dari anak-anak hingga orang tua suka meminum sinom namun tanpa repot. Hal ini menjadikan peluang usaha sinom kemasan sangat menguntungkan tidak terkecuali untuk anak-anak jalanan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Terdapat dua simpulan. **Pertama**, Terkait dengan peningkatan kemandirian anak jalanan, Model Kebijakan Shelter Anak Bangsa terdapat beberapa kelemahan yakni :

1. Dalam proses pemberdayaan, beberapa pihak yang terlibat masih didominasi oleh SKPD (Pemerintah), sedangkan dari non pemerintah masih sebatas relawan dari ormas dan lembaga psikolog yang dilibatkan.
2. Belum ada mekanisme control yang melibatkan orang tua dan masyarakat pasca anak jalanan kembali ke kehidupan normal (lulus dari shelter anak bangsa)
3. Dalam model, hasil hanya memprioritaskan kemandirian dalam hal pekerjaan saja, belum difikirkan jalur beasiswa bagi anak yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi
4. Pada permasalahan anggaran, Shelter Anak Bangsa masih bergantung pada Pemerintah Kota, belum disiapkan alternative lain untuk membiayai program kerja/kegiatan yang sudah direncanakan.

Kedua, Pengembangan Model Kebijakan Program Pemberdayaan Anak Jalanan Untuk Meningkatkan Kemandirian Di Surabaya Jawa Timur, difokuskan pada penguatan dan penambahan komponen model yang telah ada, yaitu difokuskan pada optimalisasi peran non pemerintah seperti, jaringan dunia usaha dan dunia kerja, optimalisasi peran keluarga, masyarakat, dan Perguruan Tinggi.

5.2. Saran

Implementasi Model Kebijakan Program Pemberdayaan Anak Jalanan Untuk Meningkatkan Kemandirian Di Surabaya Jawa Timur, membutuhkan peran serta semua komponen. Oleh karena itu optimalisasi peran keluarga, masyarakat, dunia usaha, dunia kerja dan perguruan tinggi dipandang sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2013. *Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010—2014*. Kemendikbud RI
- A. Naterer and V. V. Godina, “*Bomzhi and their subculture: An anthropological study of the street children subculture in Makeevka, eastern Ukraine,*” *Childhood*, vol. 18, no. 1, pp. 20–38, 2011.
- Albrecht, Karl. 2006. *Social Intelligence: The New Science of Success*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Azwar, S., 2006. *Psikologi Intelegensi*. Yogyakarta: Pustaaka Belajar
- B. Turnbull, R. Hernández, and M. Reyes, “*Street children and their helpers: An actor-oriented approach,*” *Child. Youth Serv. Rev.*, vol. 31, no. 12, pp. 1283–1288, 2009.
- Boehm, M., 2011. *Factor Structure of the Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition among Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder*. Thesis. Arizona State University.
- D. Lam and F. Cheng, “*Chinese policy reaction to the problem of street children: An analysis from the perspective of street children*” *Child. Youth Serv. Rev.*, vol. 30, no. 5, pp. 575–584, 2008.
- Dwijayanti. A.P. 2009. *Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual dan Kecerdasan Sosial Terhadap Tingkat Pemahaman*
- Ekawati, Yuliana. 2014. *Perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan oleh Pemerintah Kota Pontianak di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*
- G. Kayiranga and I. Mukashema, “*Psychosocial Factor of being Street Children in Rwanda*” *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 140, pp. 522–527, 2014.
- Gardner, Howard. 2006. *Multiple Intelligences*. New York : Basic Books
- Goleman, D. 2001. *Kecerdasan Emosional*. Jakarta: Gramedia.
- Goleman, Daniel. 2005. *Emotional Intelligence: Kecerdasan Emosional Mengapa EI lebih Penting Daripada IQ*. Edisi pertama. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- H. Ö. Bademci, “*Working with vulnerable children’: Listening to the views of the service providers working with street children in Istanbul*” *Child. Youth Serv. Rev.*, vol. 34, no. 4, pp. 725–734, 2012.
- H. Reza, “*Networks, social ties, and informal employment of Bangladeshi street children*” *Childhood*, vol. 24, no. 4, pp. 485–501, 2017.

- Hamidi, Mustofa (2018). *Pemberdayaan Anak Jalanan "Melalui Keterampilan Pembuatan Souvenir" di Panti Asuhan Mizan Amanah Perumnas, Klender Jakarta Timur*.
- I. G. Pur, "Emotion Regulation Intervention for Complex Developmental Trauma: Working with Street Children" *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 159, pp. 697–701, 2014.
- J. M. Cénat, D. Derivois, M. Hébert, L. M. Amédée, and A. Karray, "Multiple traumas and resilience among street children in Haiti: Psychopathology of survival" *Child Abus. Negl.*, vol. 79, no. January, pp. 85–97, 2018.
- J. Olsson, "Violence against children who have left home, lived on the street and been domestic workers — A study of reintegrated children in Kagera Region, Tanzania" *Child. Youth Serv. Rev.*, vol. 69, pp. 233–240, 2016.
- K. Mert and H. Kadioğlu, "The reasons why children work on the streets: A sample from Turkey" *Child. Youth Serv. Rev.*, vol. 44, pp. 171–180, 2014.
- Kurniyadi. (2014). *Pembinaan anak jalanan melalui lembaga sosial*. Skripsi : Universitas Syarif Hidayatulloh
- M. Hasan Reza and J. R. Henly, "Health crises, social support, and caregiving practices among street children in Bangladesh," *Child. Youth Serv. Rev.*, vol. 88, no. 2017, pp. 229–240, 2018.
- M. S. Harris, K. Johnson, L. Young, and J. Edwards, "Community reinserction success of street children programs in Brazil and Peru," *Child. Youth Serv. Rev.*, vol. 33, no. 5, pp. 723–731, 2011.
- Misbach, I.H., 2008. *Antara IQ, EQ, dan SQ. Pelatihan Nasional Guru Se-Indonesia Muhammad Karim. Pendidikan Kritis Transformatif*. Yogyakarta: Arruz Media, 2009.
- Mujiyadi, dkk. 2011. *Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan*. Jakarta: P3KS Press halaman 23
- Musthofa Rembangi. (2008). *Pendidikan Transformatif Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Teras.
- Nouri, A. 2018. *A phenomenological study on the meaning of educational justice for street children*. <https://doi.org/10.1177/1746197918760083>
- Oktaviany, Fenny (2010). *Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program Sekolah Otonom oleh Sanggar Anak Akar di Gudang Seng Jakarta Timur*.
- P. Mizen, "Bringing the street back in: Considering strategy, contingency and relative good fortune in street children's access to paid work in Accra," *Sociol. Rev.*, vol. 66, no. 5, pp. 1058–1073, 2018.

- Purnama, Hidayat, Rihandoyo (2013). *Strategi Pemberdayaan Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Pemuda Dan Olah Raga Kota Semarang*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/1613>
- Rahmaveda, Almira (2017). *Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Surabaya. (Sinergitas Antar Stakeholders dalam Peningkatan Kemandirian Anak Jalanan)*. Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 5 Nomor 3.
- Ramadhani, Sarbaini & Matnuh (2016). *Peranan Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Volume 6, nomor 11.
- Rizaq, A. D. B. El, Sarmini, Prasetyo, K., & Sukartiningsih, S. (2019). *Embracing Institutional Partners : As an Effort to Eradicate Street Children in Surabaya Children 's Village*. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 363(Icss).
- S. Radmard and N. Beltekin, "A Research on Sociality of Learning and Success-Istanbul Street Children Case-," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 141, pp. 1335–1338, 2014.
- Sarmini & Sukartiningsih (2018). *From The Road to the Arena : The Role of Kampung Anak Negeri for Street Children*. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 226. Atlantis Press
- Setiawan, H. H. 2007. *Mencegah menjadi anak jalanan dan mengembalikannya kepada keluarga melalui model community based*. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 12(02), 44–53.
- Suardana (2013). *Implementasi Program Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Kerja Terhadap Kemandirian Ekonomi Anak Jalanan (Studi Deskriptif Di Kabupaten Jember)*.
- Suyanto, B. 2010. *Masalah Sosial Anak*. (Y. Rendy, Ed.) (III). Jakarta: Kencana.
- Suyatna, H. (2011). *Revitalisasi Model Penanganan Anak Jalanan di Rumah Singgah*, 15, 41–54.
- W. Kaime-Atterhög, L. Å. Persson, and B. M. Ahlberg, "With an open heart we receive the children': Caregivers' strategies for reaching and caring for street children in Kenya," *J. Soc. Work*, vol. 17, no. 5, pp. 579–598, 2017.
- Yulia Ayryza. 2006. *Mewujudkan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif*. Jurnal Paradigma, No. 02 Tahun I
- Zarezadeh, T. 2013. *Investigating the Status of the Street Children: Challenges and Opportunities*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 84, 1431–1436. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.768>
- Zohar, Danah dan Ian Marshal, Ian. 2007. *Kecerdasan Spiritual (SQ) Memanfaatkan Kecerdasan Spritual dalam Berfikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*. Bandung: Mizan.

BIOGRAFI PENULIS

Sarmini

Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, meraih gelar Doktor dalam bidang Antropologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Tahun 2008), menjadi Guru besar bidang Antropologi tahun 2011. Dekan FISH Unesa 2015-2019. Beberapa buku telah dipublikasikan, antara lain: Politik Usaha Pengusaha Islam: Kiat Manipulatif Dalam Industri Penyamanan Kulit di Magetan Jawa Timur (2003), Fenomenologi (2007), Tubuh Dalam Budaya Konsumen (2008), Antara Kekerasan dan Ideologi Keluarga: Makna Kekerasan Komunitas Madura di Kemayoran Baru Surabaya (2009), Globalisasi Menjangkau Pertikaian Etnis di Indonesia: Memahami Konflik Etnis di Era Global (2009), Antropologi (2015), Model Pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan Untuk Membangun Nasionalisme Generasi Muda Menuju Generasi Indonesia 2025 (2019), Membangun Nasionalisme Generasi muda (2019). Saat ini aktif dalam beberapa kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.

Ketut Prasetyo

Seorang dosen di program S-1 dan S-2 Pendidikan Geografi dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Ketertarikan dalam minat bidang keilmuan Geografi Lingkungan didasari bahwa putera daerah Kertosono ini Lulusan S-1 Geografi dan S-2 Remote Sensing di UGM serta S-3 Pendidikan Kependudukan & Lingkungan Hidup. Adapun karya buku yang telah ditulis antara lain; Metode Pendidikan Lingkungan, Kartografi dan Penginderaan Jauh. Forum Seminar maupun Konferensi bidang keilmuan baik Nasional dan International telah diikuti. Adapun karya tulis di Jurnal internasional antara lain “Specific Migration Mudik and Balik in Indonesia” disajikan di Poznan University-Polandia, “Prospectif Geographic Study in Industrial 4.0” disajikan di Konferensi at Ashailil - Shoka University- Japan.

Agung Dwi Bahtiar El Rizaq

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya Program Studi Pendidikan IPS menyelesaikan program Sarjana pada Prodi yang sama di UIN Maliki Malang memiliki ketertarikan pada dunia penelitian dengan diterbitkannya beberapa tulisan baik melalui jurnal maupun konferensi internasional, antara lain; *Between Curiosity and Love: The Meaning of Premarital Sexual Behavior for Students in Malang City* (2018), *Trial of Character-Based Learning Models for Pancasila and Citizenship Education to Build Anti-Corruption Culture for Young Generation* (2018), *Educational Staff Responses About Career Development Policy Models at Surabaya State University* (2019), *The Urgency of Hikayat Hang-Tuah's Character Value in Building Young Generation Nationalism* (2019), *The Role of Local Character Values in Developing Social Studies Learning Materials to Improve Student's National Insight* (2019), *Embracing Institutional Partners : As an Effort to Eradicate Street Children in Surabaya Children's Village* (2019), dan *Integrasi Nilai Karakter Lokal dalam Pengembangan Bahan Ajar IPS untuk Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Siswa* (2020).

Sri Sukartiningsih

Lulusan Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya yang memiliki pengalaman sebagai researcher dan pernah bergabung sebagai fasilitator dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat. Kini, penulis adalah seorang guru Sosiologi di MAN 2 Probolinggo, oleh karenanya penulis melanjutkan pendidikannya di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya Program Studi Pendidikan IPS. Beberapa artikel yang pernah ditulis yaitu *From the Road to the Arena: The Role of Kampung Anak Negeri for Street Children* (2018), *Improving Students' Critical Thinking Skills: The Development of an Independent Learning Activity Unit (UKBM) Sociology Based on Discovery Learning* (2019) dan *What is Discovery Learning Can Grow Critical Thinking Skills?* (2019), dan *Embracing Institutional Partners: As an Effort to Eradicate Street Children in Surabaya Children's Village* (2019).

Anak jalanan menjadi salah satu tanggung jawab negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa anak jalanan harus mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam upaya melaksanakan aturan tersebut, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang meratifikasi "*The World Convention On The Rights of The Child* 1989 (Konvensi Hak Anak/KHA)", dimana konvensi ini merupakan konvensi perjanjian internasional yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang membahas mengenai hak-hak anak, selanjutnya diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak jalanan menjadi persoalan serius di Kota Surabaya. Bekerja menyebabkan anak jalanan kehilangan hak pendidikan, cenderung melakukan kriminalitas, melakukan pergaulan bebas dan rentan bahaya narkoba. Pemerintah telah melakukan program pemberdayaan anak jalanan, melalui UPTD Shelter Anak Bangsa yang dibentuk tahun 2009 untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan dengan tujuan utama untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial, akan tetapi belum berdampak signifikan terhadap kemandirian. Masih ada anak jalanan yang memilih kembali kepada kehidupan jalanan.

Pemberdayaan anak jalanan merupakan sebuah upaya dalam bentuk program kegiatan yang bertujuan untuk membantu memperoleh wawasan dan pengetahuan serta mengasah kemampuan dan keterampilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Partisipasi dan kerjasama berbagai pihak menjadi penting. Shelter Anak Bangsa adalah nama samaran dari lembaga penampungan anak jalanan di Surabaya, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi dan melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan.

Buku referensi ini merupakan hasil penelitian tentang pengembangan model kebijakan program pemberdayaan peningkatan kemandirian anak jalanan di Kota Surabaya. Buku ini menawarkan model pemberdayaan kemandirian, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan kebijakan di Shelter Anak Bangsa dan Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) terkait dalam melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan di Kota Surabaya. Model ini menguatkan pada unsur sinergitas dalam pemberdayaan anak jalanan antara Pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian anak jalanan.